

**Serdadu Belanda di Indonesia
1945-1950**

Gert Oostindie
bekerja sama dengan
Ireen Hoogenboom
dan Jonathan Verwey

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950

**Kesaksian perang
pada sisi sejarah yang salah**

Penerjemah
Susi Moeimam
Nurhayu Santoso
Maya Sutedja-Liem

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
KITLV-Jakarta
Jakarta, 2016

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950: Kesaksian perang pada sisi sejarah yang salah / Gert Oostindie bekerja sama dengan Ireen Hoogenboom dan Jonathan Verwey; penerjemah: Susi Moeimam, Nurhayu Santoso, dan Maya Sutedja-Liem; Cet. 1 – Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; KITLV-Jakarta, 2016.

xxvi + 372 hlm.: 16 x 24 cm
ISBN: 978-979-461-684-0

Judul asli:

Soldaat in Indonesië 1945-1950: Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis.

Diterbitkan oleh Prometheus, 2015

© 2015 Gert Oostindie

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang
All rights reserved

Hak terjemahan bahasa Indonesia pada penerjemah
Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Anggota IKAPI DKI Jakarta

Buku ini terwujud berkat dukungan dari Dutch Foundation for Literature, Stichting dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds, Stichting professor van Winter Fonds, dan KITLV.
Untuk informasi lebih lanjut lihat: <http://www.kitlv.nl/research-projects-dutch-military-operations-in-indonesia/>

Nederlands
letterenfonds
dutch foundation
for literature

Bagian penting buku ini terdiri dari kutipan-kutipan. Kutipan-kutipan itu dipilih untuk memperlihatkan sebanyak mungkin catatan pribadi dari para militer/veteran yang bersangkutan. Penerbit telah berupaya menemukan semua pemilik hak cipta dokumen yang digunakan. Namun, bagi mereka yang mengklaim memiliki hak cipta atas dokumen tersebut, harap menghubungi Penerbit.

Cetakan pertama: September 2016

YOI: 591.26.14.2008

Desain sampul: Iksaka Banu

Foto sampul depan: Patroli di Dadapayam, Jawa Tengah, 31 Agustus 1948 (fotografer Th. van de Burgt, koleksi Nationaal Archief, Den Haag, Belanda)

Foto penulis: Anneke Hymmen

Penerjemah: Susi Moeimam, Nurhayu Santoso, Maya Sutedja-Liem

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jln. Plaju No. 10
Jakarta 10230
Telepon: 021-31926978, 3920114
Faksimil: 021-31924488
email: yayasan_obor@cbn.net.id
www.obor.or.id

KITLV-Jakarta
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. S-3
Jakarta 12950
Telepon: 021-5275988
Faksimil: 021-5275987
email: kitlv.jkt@library.leidenuniv.nl
www.library.leiden.edu/KITLV-Jakarta

Daftar isi

Kata pengantar Dr. Abdul Wahid	vi
Kata pengantar edisi Indonesia	xv
Kata pengantar edisi Belanda	xviii
Catatan untuk pembaca	xxv
1 Pendahuluan	1
2 Misi	38
3 Negeri jauh dengan penduduknya yang asing	61
4 Lawan	83
5 Politik dan angkatan bersenjata	104
6 Tindak kejahatan perang: analisis	134
7 Kejahatan perang: kesaksian-kesaksian	169
8 Refleksi terhadap tindak kekerasan	207
9 Kehidupan tentara	239
10 Pulang ke tanah air	273
Pertanggungjawaban dan ucapan terima kasih	297
Bibliografi dan panduan baca	314
Daftar pustaka sekunder	328
Daftar singkatan dan istilah	331
Personalia militer dalam kutipan	340
Indeks	364

Kata pengantar

Berdamai dengan masa lalu yang ‘kelam’

Dr. Abdul Wahid

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Sejarah pada dasarnya adalah ingatan atau memori. Meskipun definisi generik dari sejarah adalah semua hal yang terjadi di masa lampau, namun sejarah yang tersajikan pada saat sekarang dalam berbagai format rekonstruksi adalah sejarah yang diingat atau berusaha diingat untuk alasan tertentu. Sementara peristiwa atau hal-hal yang tidak ada dalam catatan sejarah bisa dikatakan merupakan masa lalu yang dilupakan atau terlupakan. Ada banyak alasan mengapa sebuah masa lalu diingat atau dilupakan; sebagian besar biasanya ditentukan oleh kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang. Untuk itulah sejarah ditulis oleh para sejarawan. Namun realitas kehidupan manusia sangat kompleks, dan kemampuan serta kebutuhan untuk mengingat atau melupakan masa lampau seringkali dibatasi oleh persoalan teknis dan alamiah tetapi juga oleh kepentingan masing-masing individu. Kebutuhan individu untuk memelihara ingatan bisa sangat berbeda dengan kebutuhan kolektif masyarakat atau negara. Demikian sebaliknya, sekalipun negara berusaha mengontrol ingatan individu atau masyarakat, seberapapun kuatnya upaya tersebut, pasti hasilnya bersifat sementara dan relatif. Akan selalu ada memori individu yang tercecce, berbeda, dan berdiri sendiri. Terlebih jika itu menyangkut peristiwa atau periode tertentu yang dialami secara kolektif, yang upaya untuk mengingatnya berusaha dimonopoli dan dikendalikan oleh kekuasaan negara karena alasan politis.

Buku ini merupakan contoh dari ‘politik memori’ tersebut. Ia menampilkan ingatan dan pengakuan ‘jujur’ dari individu-individu di Belanda

yang pernah terlibat perang di Indonesia pada tahun 1945-1949, yang secara umum menunjukkan nuansa berbeda dengan narasi sejarah yang dipromosikan oleh pemerintah Belanda selama setidaknya empat dekade terakhir. Meskipun Belanda ‘berbagi’ sejarah kolonial yang panjang dengan Indonesia, namun periode 1945-1949 menjadi episode sejarah yang paling ‘panas dan emosional’ di Belanda (juga di Indonesia) dan hingga saat ini masih menjadi perdebatan akademik maupun politis di sana. Pokok perdebatan terpusat pada pertanyaan apakah memang telah terjadi kekerasan yang berlebihan atau kejahatan perang yang dilakukan oleh tentara Belanda terhadap penduduk Indonesia – utamanya penduduk sipil, selama berlangsungnya operasi militer pada periode tersebut. Selain itu, pertanyaan tersebut juga menjadi sangat politis karena terkait gugatan akan keabsahan perang tersebut yang secara langsung terkait posisi politik dan pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia, dan hubungan bilateral Belanda dan Indonesia kemudian hari. Pertanyaan tersebut, kiranya belakangan menjadi semakin kencang diajukan oleh publik Belanda setelah menguatnya kesadaran mereka akan Hak Asasi Manusia (HAM), dan keinginan Belanda untuk mencitrakan dirinya sebagai negara pelopor HAM di dunia.¹

Pertama-tama harus ditekankan bahwa buku ini adalah sebuah karya ilmiah yang dihasilkan melalui proses kerja sistematis dengan metodologi yang jelas berlandaskan semangat akademis. Penulisnya, Prof. Gert Oostindie adalah direktur KITLV sekaligus profesor sejarah Belanda kolonial dan poskolonial di Universitas Leiden. Sebagai karya akademik buku ini memang terasa ‘berat’ meskipun menyajikan analisis yang cermat dan hati-hati, dengan bahasa tutur yang mengalir. Sumber utamanya adalah kesaksian para veteran perang yang berusaha merekam dan mewariskan ingatannya melalui apa yang disebut penulis buku ini sebagai dokumen ego (*ego document*), yaitu: buku catatan harian, surat menyurat dengan keluarga dan kolega, memoar, biografi, dan rekaman wawancara. Sebagaimana dijelaskan penulis, mereka umumnya adalah bekas tentara wajib militer – bukan militer profesional, yang ‘terpaksa’ harus ikut berperang karena keinginan sendiri, terbujuk propaganda, perintah, atau bahkan ancaman dari negaranya, sehingga memiliki ingatan dan penilaian yang berbeda dengan kelompok tentara lainnya. Tercatat ada 659 judul korpus dokumen yang ditulis oleh/tentang 1.362 orang digunakan sebagai sumber utama penulisan buku ini; sebuah jumlah yang relatif ‘kecil’ dibandingkan jumlah total veteran yang ikut perang di Indonesia. Meskipun penulis mengakui sumber tersebut tidak bisa mewakili pandangan para veteran Belanda secara keseluruhan, namun

kesaksian dalam dokumen ego tersebut bisa membantu memberikan informasi alternatif tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan selama periode yang kompleks tersebut.

Sudah barang tentu penerbitan buku ini dalam versi bahasa Indonesia patut disambut gembira. Pertama-tama, karena buku ini menceritakan secara tidak langsung tentang realitas historis yang terjadi di Indonesia melalui kaca mata para veteran perang Belanda yang bisa jadi belum banyak tersaji dalam historiografi Indonesia. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan perkembangan dan perdebatan mutakhir tentang historiografi perang tahun 1945-1949 di Belanda. Memang harus diakui bahwa perkembangan historiografi dan perdebatan akademik di Belanda dan di Indonesia tentang periode ini, hampir bisa dikatakan berjalan sendiri-sendiri dan relatif jarang sekali 'bertemu' atau 'dipertemukan'. Tidak seperti periode sejarah kolonial lainnya, yang mana perbincangan akademik di antara para peneliti Belanda dan Indonesia berjalan cukup intensif, dan karya-karya akademik dari kedua belah pihak relatif cukup saling dikenali, terutama karya-karya akademisi Belanda yang sudah banyak dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Informasi tentang perdebatan historiografis di Belanda tentang periode ini tidak banyak diikuti oleh banyak sejarawan dan masyarakat peminat sejarah di Indonesia, kecuali oleh segelintir orang melalui diskusi terbatas mereka di surat kabar, blog, atau media sosial.

Dalam bab Pendahuluan, misalnya, penulis menguraikan posisi buku ini dalam perdebatan historiografis mutakhir di Belanda, sebagai upaya lebih lanjut untuk merevisi *Excessennota* yang terbit pertama kali pada tahun 1969.² Buku terakhir dianggap oleh banyak pihak merupakan 'buku putih' resmi Pemerintah Kerajaan Belanda tentang dampak dari operasi militer Belanda di Indonesia pada periode 1945-1950. Buku tersebut menyebutkan 110 kasus kekerasan yang dilakukan tentara Belanda terhadap para pejuang dan penduduk sipil Indonesia. Menurut buku ini, kekerasan tersebut merupakan 'ekses' semata, sebagai kejadian yang tidak disengaja, yang dilakukan oleh individu-individu tentara Belanda (bukan karena perintah atau strategi resmi atasan atau kesatuannya), dan terjadi secara insidental. Selama lebih dari seperempat abad lamanya, versi sejarah resmi ini relatif tidak mendapatkan 'penentangan' dari versi alternatif walaupun diskusi publik dan polemik tentang perang tersebut terus berlangsung di berbagai media, forum, dan dalam parlemen Belanda. Buku karya J.A.A. van Doorn dan W.J. Hendrix, *Ontsparing van Geweld*³ yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1970 menjadi satu-satunya pengecualian karena menawarkan penjelasan berbeda.

Baru pada kurun lima tahun terakhir, *Excessennota* mendapatkan bantahan serius oleh generasi baru sejarawan Belanda. Dua di antaranya yang terbaru adalah karya Louis Zweers dan Rémy Limpach. Louis Zweers dalam disertasinya ‘*De Gecensureerde Oorlog*’ yang dipertahankan pada akhir 2013 berpendapat bahwa Pemerintah Belanda telah menutup-nutupi banyak hal, terutama tentang aksi kekerasan dan ‘kejahatan perang’ yang dilakukan tentaranya terhadap pejuang dan penduduk Indonesia selama perang 1945-1949.⁴ Sementara itu, Rémy Limpach dalam disertasinya ‘*De Brandende Kampongs van Generaal Spoor*’ menegaskan bantahannya terhadap *Excessennota* bahwa kekerasan yang dilakukan tentara Belanda tersebut pada dasarnya bersifat ‘struktural’ dan bukan semata-mata akses belaka.⁵ Entah kebetulan atau tidak karya-karya baru tersebut muncul setelah kasus Rawagede dan Westerling berhasil dibawa ke pengadilan Belanda pada tahun 2011 dan 2012, yang berhasil ‘memaksa’ Pemerintah Belanda untuk mengeluarkan permohonan maaf dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban kedua peristiwa kekerasan tersebut. Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan langkah progresif berikutnya dari ‘historiografi revisionist’ tersebut, dengan menampilkan kesaksian dari para pelaku sejarah periode tersebut.

Selain menyajikan diskusi historiografis, buku ini juga menawarkan sejumlah fakta dan penjelasan menarik tentang kompleksitas latar belakang dan kondisi tentara Belanda sebelum, selama, dan sesudah dikirim ke Indonesia, yang mungkin belum banyak diketahui masyarakat Indonesia. Dari segi komposisi misalnya, ternyata dari total 220.000 tentara yang dikerahkan Pemerintah Belanda selama perang, 160.000 di antaranya adalah orang Belanda dan 60.000 sisanya adalah tentara KNIL rekrutan lokal dari berbagai etnis, utamanya Ambon, Minahasa, Jawa, dan sebagainya. Dari 160.000 tentara Belanda tersebut, sekitar 100.000 orang merupakan tentara wajib militer, 50.000 sukarelawan perang, dan hanya 1.000 orang tentara profesional. Dari sisi usia, para tentara wajib militer dan sukarelawan tersebut rata-rata adalah anak-anak muda berusia 20 tahunan, yang sebagian besar bahkan belum pernah memperoleh pelatihan militer dan pengalaman bepergian jauh dari tempat kelahirannya. Mereka memiliki pengetahuan yang sangat minim tentang Indonesia, tentang masyarakat dan budayanya, dan tentang kondisi sebenarnya di Indonesia saat itu; sementara pembekalan militer yang mereka peroleh sebelum berangkat sangat jauh dari mencukupi. Mereka sebagian besar memiliki motivasi dan misi yang ‘naif’ – sebagian karena propaganda pemerintahnya: bahwa tujuan utama

mereka ke 'Hindia Belanda' adalah untuk membebaskannya dari Fasisme Jepang dan kemudian menegakkan keamanan dan ketertiban, melindungi penduduknya dari 'para pengacau'. Mereka tidak memiliki bayangan bahwa mereka akan menghadapi resistensi sengit dari pemuda, pejuang, dan tentara Indonesia. Kondisi ini tentu berpengaruh besar terhadap apa yang terjadi dan apa yang mereka lakukan di medan pertempuran nantinya.

Bagian terpenting dari buku ini tentunya adalah diskusi tentang kekerasan eksekutif atau kejahatan perang yang terjadi pada periode konflik tersebut. Sebagai karya ilmiah, buku ini tentu saja tidak lagi ingin terjebak pada pertanyaan lama yang memperdebatkan secara emosional ada dan tidaknya perbuatan tersebut. Penulis secara tegas, mengakui adanya berbagai kekerasan eksekutif yang dilakukan tentara Belanda tersebut, namun ia ingin menjawab pertanyaan yang lebih lanjut 'mengapa dan dalam kondisi apa perbuatan dan aksi tersebut bisa terjadi'. Tujuannya bukanlah untuk mencari apologi atau pembenaran, namun lebih pada upaya untuk memahami dan mencari penjelasan yang lebih baik tentang proses historis yang melatari terjadinya rangkaian kekerasan eksekutif tersebut. Untuk tujuan itulah, maka buku ini menampilkan kutipan langsung dari korpus-korpus dokumen ego yang berisi kesaksian 'para pelaku' tersebut. Tentu saja, isinya sangat subyektif dan sepenuhnya menunjukkan sudut pandang mereka, dan barangkali bagi sebagian besar pembaca dan masyarakat Indonesia akan sedikit mengguncangkan. Tapi justru di situlah daya tarik buku ini, karena berusaha menunjukkan secara 'jujur' perasaan, emosi, dan refleksi (sebagian) tentara Belanda, terhadap peristiwa-peristiwa buruk yang mereka alami. Bisa dikatakan sangat jarang sekali ditemukan, terlebih untuk konteks Indonesia sendiri, sumber-sumber sejarah yang mengungkapkan perspektif dari 'pelaku peristiwa kekerasan'.

Tentang kekerasan eksekutif atau kejahatan perang yang terjadi, melalui sumber tersebut, penulis menemukan adanya 779 laporan kekerasan – jauh di atas laporan *Excessennota*. Menurut penulis kekerasan tersebut bisa dikelompokkan menjadi enam kategori, yaitu 1. kejahatan individual di luar konteks militer, 2. kekerasan menggunakan senjata mesin, artileri, dan serangan udara, 3. kekerasan selama patroli dan pengawasan, 4. kekerasan yang terkait pekerjaan intelijen, 5. Kekerasan akibat operasi khusus, dan 6. kekerasan jenis lainnya, meliputi kelalaian, intimidasi, vandalisme, dan penggunaan amunisi ilegal. Menurut pengakuan penyusun dokumen ego tersebut, kekerasan tersebut seringkali terjadi karena mereka terjebak pada situasi mendesak, pada lingkaran kekerasan atau

‘perangkap kekerasan’ sehingga prinsip *better safe than sorry, kill or to be killed*, menjadi pilihan satu-satunya. Selain itu, seringkali juga aksi kekerasan eksekutif dilakukan sebagian mereka, sebagai balas dendam atas apa yang dilakukan para pejuang, pemuda milisi atau tentara TNI (sebelumnya BKR, lalu TRI) kepada penduduk sipil Belanda selama periode *Bersiap*⁶ (akhir 1945 hingga akhir 1946) dan kepada teman-teman mereka sesama militer. Di sini, sebagaimana ditekankan penulis buku ini, kesaksian yang disampaikan para veteran tersebut ingin menunjukkan bahwa mereka berada dalam posisi defensif, bukan ofensif, sehingga apa yang dilakukan adalah keterpaksaan (yang tentu saja belum tentu benar adanya).

Dari sudut pandang militer, sejumlah sejarawan menilai bahwa konflik bersenjata antara Belanda dan Indonesia pada tahun 1945-1949 adalah perang asimetris (*asymmetric warfare*), sebuah perang yang tidak berimbang, terutama dari sisi persenjataan. Belanda menggunakan persenjataan modern, sementara pihak Indonesia lebih banyak menggunakan senjata tradisional ditambah sedikit senjata modern hasil rampasan dari Jepang. Dalam keadaan timpang tersebut, bisa dipahami jika pejuang dan tentara Indonesia menggunakan strategi perang gerilya yang membingungkan dan menyulitkan tentara Belanda. Akibatnya, aksi kekerasan terhadap penduduk sipil seringkali tidak terhindarkan, karena pihak Belanda kebingungan untuk menentukan siapa ‘musuh’ sebenarnya. Pada sisi yang lain, di kubu Indonesia sendiri terdapat beragam kelompok milisi dan organisasi semi-militer yang tidak jarang saling berselisih satu dengan lainnya (karena faktor ideologis tapi juga pragmatis) dan seringkali melakukan inisiatif sendiri tanpa berkonsultasi dengan tentara profesional Indonesia, yang saat itu jumlahnya masih terbatas. Kondisi tersebut pada akhirnya menciptakan lingkaran kekerasan berlapis, tidak hanya kekerasan antara tentara Belanda (Inggris dan sekutu) dengan pejuang dan tentara Indonesia, tetapi juga kekerasan antar kelompok di Indonesia, seperti dalam kasus Peristiwa Madiun 1948 dan sejumlah ‘revolusi sosial’ lainnya.⁷

Dalam konteks kekerasan eksekutif tentara Belanda, penulis menggarisbawahi adanya kebencian rasial dan etnosentrisme yang ikut bermain dalam setiap peristiwa kekerasan. Kebencian rasial tergambar dalam ungkapan kemarahan, dendam, ketakutan, dan frustrasi mereka yang terbaca secara gamblang dan vulgar dalam kutipan-kutipan yang tersaji. Mereka menganggap pihak Indonesia sering menyalahi kesepakatan damai, dan mereka melakukan berbagai bentuk kekerasan yang tidak dikenal dalam budaya Barat mereka. Dalam kaitan itu, pandangan

etnosentrisme terbaca dengan kuat dalam pandangan mereka bahwa pelaku kekerasan eksesif seringkali dilakukan oleh tentara KNIL rekrutan lokal, bukan oleh tentara wajib militer Belanda, karena mereka pada dasarnya sudah terbiasa dengan 'kondisi dan cara lokal'. Meskipun tidak sepenuhnya bisa dipercaya, demikian menurut penulis, namun banyak dokumen ego menyebutkan bahwa tentara-tentara KNIL adalah pelaku utama kekerasan eksesif. Mereka selalu berada di front paling depan untuk menghadapi gerilya tentara Indonesia, dan mereka sering digunakan dalam interogasi, penyiksaan dan eksekusi, termasuk dalam kejahatan perang skala besar yang dilakukan pasukan khusus pimpinan Kapten Westerling di Sulawesi Selatan.

Selain memori kelam yang penuh emosi tentang 'perang jahanam tersebut', buku ini juga menampilkan aspek dan sisi lain dari ingatan perang para veteran tersebut yang lebih 'manusiawi'. Selain perasaan dan pandangan negatif tentang lawannya, sebagian dari mereka juga menunjukkan kenangan yang positif tentang Indonesia: kekaguman akan keindahan alamnya, keramahan penduduknya, kelezatan makanannya, dan bahkan penghormatan akan kegigihan semangat juang tentara Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan negerinya. Bab 9 tentang kehidupan tentara, bahkan menunjukkan adanya hubungan pribadi sejumlah tentara dengan para perempuan Indonesia – meskipun banyak pula yang bernuansa negatif. Pertemanan tidak jarang ditunjukkan oleh sebagian mereka dengan tentara Indonesia, terutama setelah gencatan senjata. Mereka sadar bahwa perang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak, dan mereka menyalahkan para politisi di belakang meja, yang seringkali memutuskan sesuatu tanpa mempedulikan perasaan dan kondisi mereka di medan pertempuran. Kekecewaan tersebut semakin kuat terutama setelah kembali ke tanah airnya, setelah sedikit basa-basi penyambutan, mereka dihujani dengan kritik dan bahkan tuduhan bahwa mereka telah melakukan kejahatan kemanusiaan dalam perang yang seharusnya tidak terjadi, dan tidak akan pernah dimenangkannya. Kondisi itulah yang menyebabkan mereka merasa 'berada di sisi sejarah yang salah'.

Lalu kira-kira apa makna kehadiran buku ini bagi masyarakat Indonesia? Tentu sebagaimana disinggung di awal, pertama-tama buku ini merupakan pengantar yang baik untuk memperkenalkan perkembangan historiografis di Belanda dan perdebatan mereka tentang sejarah dekolonisasinya di Indonesia. Pada sisi yang lain, barangkali buku ini juga bisa menimbulkan kesan yang menegaskan kebenaran narasi nasionalistik historiografi Indonesia selama ini bahwa tentara Belanda memang telah melakukan kejahatan perang di Indonesia.

Namun menurut hemat kami, kesan seperti itu sebaiknya disimpan saja. Akan lebih produktif untuk memandang kehadiran buku ini, terutama bagi para sejarawan Indonesia, sebagai undangan – jika bukan tantangan – untuk meneliti kembali periode perang kemerdekaan tahun 1945-1949 yang belakangan minatnya cenderung menurun. Buku ini bisa menjadi contoh bagaimana realitas-realitas kekerasan di masa lampau coba difahami secara ‘dingin’ dan kritis. Buku ini hanya menampilkan satu sisi persepsi saja, hanya dari pihak tentara wajib militer Belanda, tentu akan sangat dibutuhkan perspektif tentara Indonesia untuk mengimbangi atau melengkapinya. Oleh karena itu, sejarawan Indonesia juga perlu segera melakukan pengumpulan dan kemudian penilaian dokumen ego dari para veteran Indonesia sebagaimana yang dilakukan penulis buku ini. Kita juga punya cukup banyak biografi, memoar, dan hasil wawancara sejarah lisan tentang periode tersebut dan tentunya arsip yang kaya di sejumlah lokasi dan lembaga kearsipan. Kiranya, usaha seperti itu harus segera dilakukan sehubungan dengan semakin berkurangnya jumlah pelaku sejarah dari periode ini yang masih bisa ditemui dalam masyarakat kita.

Selain itu, buku ini juga bisa menjadi cermin untuk melihat ‘celah’ dan ‘ruang kosong’ yang ada dalam historiografi perang kemerdekaan kita selama ini. Kami bayangkan, pembaca Indonesia dan khususnya sejarawan dan peminat sejarah, akan menemukan banyak poin yang mengejutkan atas ‘tuduhan’ yang disampaikan dalam dokumen ego tersebut, terutama menyangkut aksi-aksi kekerasan yang katanya juga dilakukan pejuang, pemuda, dan tentara Indonesia. Tentunya hal ini perlu diklarifikasi lebih lanjut, apakah memang itu cuma ekspresi emosional dan tuduhan ‘ngawur’ mereka semata atautkah memang historis adanya. Tak kalah penting adalah aspek-aspek humanis yang secara langsung maupun tidak langsung dimunculkan oleh buku ini, kiranya bisa diteliti lebih lanjut. Bagaimana, misalnya, masyarakat Indonesia pada waktu itu menjalani hidupnya sehari-hari, bekerja mencari sesuap nasi di tengah suasana perang, bagaimana relasi sebagian di antara mereka dengan para tentara Belanda termasuk di lokalisasi pelacuran, dan seterusnya. Pendek kata, buku ini bisa mengingatkan kita semua bahwa periode perang kemerdekaan masih menyisakan banyak agenda riset bagi penelitian lanjutan. Secara teoretik, buku ini juga menunjukkan bahwa sejarah bukanlah sebuah titik, ia adalah sebuah koma dalam kalimat panjang yang belum selesai, dan memang sebaiknya jangan pernah dianggap selesai. Pengkajian ulang, penelitian kembali, dan pemaknaan baru harus selalu dilakukan karena itu

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950

merupakan kebutuhan kita pada masa sekarang, sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan masa depan kita semua yang lebih baik.

Selamat membaca.

Yogyakarta, Agustus 2016

Catatan

- 1 Stef Scagliola, 'Cleo's "unfinished business": Coming to terms with dutch war crimes in indonesia's war of independence', *Journal of Genocide Research*, 14 (3-4) (2012), hlm. 419-439.
- 2 Jan Bank, *et al.*, *Excessennota: Nota betreffende het archiefonderzoek naar de gegevens omtrent excessen in Indonesië begaan door Nederlandse militairen in de periode 1945-1950* (Den Haag: Sdu Uitgeverij Koninginnegracht, 1995).
- 3 J.A.A. van Doorn & W.J. Hendrix, *Ontsporing van geweld: het Nederlands-Indonesisch conflict*, (Zutphen: Walburg, 2012.)
- 4 Louis Zweers, *De gecensureerde oorlog. Militairen versus media in Nederlands-Indië, 1945-1949* (Zutphen: Walburg, 2013).
- 5 Rémy Limpach, *De brandende kampongs van Generaal Spoor* (Amsterdam: Boom Uitgevers, 2016).
- 6 'Periode Bersiap' (*Bersiap periode*) mengacu pada masa sesudah Jepang menyerah dan saat tentara Sekutu ditugaskan menjaga keamanan sebelum kedatangan tentara Belanda. Pada saat itu ribuan penduduk sipil Belanda, Indo-Belanda, Tionghoa, dan Ambon menjadi korban beragam aksi kekerasan yang dilakukan pemuda dan milisi Indonesia. Istilah *Bersiap*, dimunculkan oleh para penyintas dan sangat dikenal dalam historiografi Belanda, namun hampir tidak dikenal dalam historiografi Indonesia. Tentang kekerasan *Bersiap* ini lihat misalnya Herman Bussemaker, *Bersiap! Opstand in Het Paradijs: De Bersiap-Periode op Java en Madura* (Zutphen: Walburg, 2013); Robert Cribb, 'The Brief Genocide of the Eurasians in Indonesia, 1945/1946' dalam A. Dirk Moses (ed.), *Empire, Colony, Genocide: Conquest, Occupation, and Subaltern Resistance in World History* (New York: Berghahn Books, 2008), hlm. 424-439.
- 7 Remco Raben, 'On genocide and mass violence in colonial Indonesia', *Journal of Genocide Research*, 14 (3-4) (2012), hlm. 485-502; William Frederick, 'Shadows of an Unseen Hand: Some Patterns of Violence in the Indonesian Revolution', dalam Freek Colombijn dan J. Thomas Lindblad (ed.), *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective* (Leiden: KITLV Press, 2002), hlm. 143-173.

Kata pengantar edisi Indonesia

Apakah suka atau tidak, Indonesia dan Belanda telah berbagi sejarah selama beberapa abad. ‘Berbagi’ sejarah, sejarah ‘bersama’: sebutan yang ramah untuk sejarah kolonial, dan kata-kata itu kedengaran lebih indah daripada apa yang kebanyakan terjadi di masa lalu. Namun demikian: lebih dari tujuh puluh tahun setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, dengan besar hati diusulkan agar tidak mengungkit-ungkit masa lalu yang sarat beban itu dan justru sebaiknya bersama-sama melihat ke depan. Beberapa hari yang lalu, pada malam menjelang kunjungan kilatnya ke Belanda, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa melihat ke depan adalah semboyan utamanya. Bagi beliau, penelitian tentang perang dekolonisasi 1945-1949 tidak memiliki prioritas. Demikianlah, reaksi beliau atas ungkapan Menteri Luar Negeri Belanda Belanda Bert Koenders, yang beberapa minggu sebelumnya – pada waktu melakukan kunjungan kerja ke Indonesia – justru menganjurkan untuk mengadakan penyelidikan menyeluruh terhadap periode itu, termasuk juga penyelidikan terhadap pokok pembicaraan yang menyakitkan, yaitu: kejahatan perang Belanda.

Di Indonesia, sejarah tahun 1945-1949 diceritakan dari perspektif yang sama sekali berbeda daripada di Belanda. Paparan cerita yang dominan di Indonesia adalah tentang lahirnya Republik Indonesia sebagai buah perjuangan heroik sekelompok suku bangsa yang bersatu untuk kemerdekaan mereka. Suatu perjuangan yang dipimpin oleh Sukarno dan juga oleh TNI. Di negara saya, paparan ceritanya di satu sisi tentang penderitaan orang-orang Belanda selama pendudukan Jepang (1942-1945) dan periode Bersiap (akhir 1945 - awal 1946), di sisi lainnya tentang usaha yang memakan waktu lama dan sia-sia untuk melakukan dekolonisasi sesuai dengan cara yang diinginkan Belanda. Kesamaan kedua paparan itu adalah kecenderungan untuk hanya berbicara tentang konflik dekolonisasi bilateral dan dengan demikian menyembunyikan kompleksitas Revolusi Indonesia, dengan semua konflik internalnya.

Sebagai seorang sejarawan *Belanda*, saya adalah orang yang paling tidak berhak untuk memberitahu rekan-rekan Indonesia saya, atau orang Indonesia

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950

yang manapun, apa yang seharusnya terutama mereka cari, atau tidak cari, tentang sejarah Indonesia yang masih muda. Sebagai seorang sejarawan dan direktur KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde) – lembaga yang sejak tahun 1851 di bawah perlindungan keluarga kerajaan Belanda berkembang menjadi gudang pengetahuan tentang Indonesia – bagaimanapun juga saya merasa bertanggung jawab untuk menyumbangkan suatu pemahaman yang baik di negara saya sendiri tentang apa arti kolonialisme bagi rakyat di Nusantara, dan bagaimana kolonialisme ini dulu diakhiri. Dengan keyakinan ini, saya sebelumnya juga telah menulis buku-buku tentang sejarah kolonial dan pascakolonial Belanda.

Serdadu Belanda di Indonesia, 1945-1950: Kesaksian perang pada sisi sejarah yang salah merupakan karya yang layak dalam rangka ini. Edisi Belandanya telah diterbitkan tahun lalu dan juga dalam pandangan politik memiliki sejarah awal yang menarik; Anda dapat membacanya di halaman pertanggungjawaban di bagian belakang buku ini. Buku ini merupakan bagian dari perdebatan Belanda yang dalam beberapa dasawarsa terakhir menjadi semakin kritis saja, tidak hanya dalam hal legitimasi aksi politik dan militer Belanda, tetapi juga tentang praktik aksi itu, dan khususnya dalam masalah kejahatan perang. Kesimpulan yang saya tarik dalam buku ini adalah bahwa tindakan-tindakan kejahatan tersebut merupakan unsur yang bersifat struktural dalam pelaksanaan perang kami. Penting bagi negara saya untuk membuka mata terhadap hal tersebut, lengkap dengan semua nuansa yang ada. Belanda senang menampilkan dirinya sebagai penjaga hak asasi manusia internasional, suatu usaha yang mulia. Namun, saya yakin bahwa justru suatu negara dengan sejarah kolonialnya yang berjangka panjang hanya bisa memainkan perannya secara meyakinkan, kalau negara itu benar-benar berani secara terbuka berbicara tentang kegagalan sendiri yang pernah terjadi sebelumnya untuk memenuhi standar moral yang tinggi. Dan sayangnya, hal itu juga berlaku untuk banyak peristiwa sejarah kami di Indonesia antara tahun 1945 dan 1949.

Berdasarkan keyakinan itu, buku *Serdadu Belanda di Indonesia* ditulis. Buku ini adalah buku dengan banyak ruang untuk nuansa, dengan memperhatikan kompleksitas dan kontradiksi dari masa itu. Buku ini tidak memiliki pesan moral, tetapi mengajak pembaca untuk memikirkan tentang politik dan moralitas. Paling tidak, saya berharap bahwa pembaca Belanda merasakan maksud saya itu. Yang pasti, bahwa perhatian publik yang besar terhadap buku ini di negara

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950

saya mencerminkan adanya kemauan yang berkembang untuk membuka mata terhadap masa lalu tersebut.

Saya tidak bisa memprediksi apa arti edisi Indonesia ini. Saya berterima kasih kepada penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia atas inisiatifnya untuk menerbitkan terjemahan ini, dan saya berharap buku ini akan dibaca dan akan didiskusikan, termasuk juga pada unsur-unsur yang terasa kurang sesuai dengan wacana yang umum dalam perang di Indonesia. Saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada Susi Moeimam, Maya Liem, Nurhayu Santoso atas terjemahan mereka yang berkualitas, kepada Abdul Wahid (UGM) atas kata pengantarnya yang indah, kepada Andreas Haryono (Obor) atas koordinasi dan bimbingannya yang baik dan cermat, kepada Marrik Bellen (KITLV-Jakarta) atas bantuan dan perantaraannya, kepada Ireen Hoogenboom dan Harry Poeze (KITLV) atas bantuan mereka yang terus-menerus dan juga terima kasih kepada Dutch Foundation for Literature, Erasmushuis, Kedutaan Besar Belanda, KITLV-Jakarta dan Prometheus. Harapannya buku ini akan dapat merangsang sejarawan Indonesia untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dari perspektif mereka sendiri. Bukanlah peran saya untuk merumuskan agenda Indonesia untuk penelitian sejarah. Saya sangat yakin bahwa bersama-sama melihat kembali ke belakang dapat membantu kedua negara kita untuk bersama-sama tetap terus melihat ke depan.

Gert Oostindie, April 2016

Kata pengantar edisi Belanda

Perang kami di Indonesia tetap saja membangkitkan emosi yang tinggi pada generasi kemudian di Belanda. Itu tidaklah aneh. Di waktu itu Belanda mengerahkan 220.000 serdadunya untuk suatu perang yang tidak dimenangkan dan yang sesudahnya semakin sering dicap salah. Pada dasawarsa pertama setelah kegagalan total itu, isu perang tersebut dipendam hilang dalam ingatan kolektif. Sejak soal perang itu diungkap kembali, maka debat umum itu terutama membahas pertanyaan apakah para serdadu Belanda telah bersalah melakukan tindak kejahatan perang. Itu baru satu sudut pandang saja, ada sejumlah pertanyaan lebih luas yang diajukan mengenai episode yang secara bersamaan merupakan perang dekolonisasi dan perang sipil yang kacau, dan yang melahirkan Republik Indonesia yang berangkatan senjata kuat. Namun, pertanyaan tentang kejahatan perang tetap sangat penting, meskipun hanya karena Belanda banyak berpatokan pada nilai-nilai agenda internasional tentang hak asasi manusia, dalam perdamaian dan peperangan. Termasuk dalam pertanyaan itu adalah refleksi masa lalu angkatan bersenjata sendiri.

Sejak penyerahan kedaulatan Indonesia pada Desember 1949 pemerintah Belanda membuat tiga pernyataan yang mengundang perhatian tentang perang di Indonesia. Di tahun 1969 Perdana Menteri Piet de Jong menyatakan bahwa serdadu Belanda mungkin saja telah melakukan kesalahan terhadap apa yang disebut spesifik dengan ‘ekses-ekses’ – eufemisme untuk tindakan kejahatan perang – tetapi ‘bahwa angkatan bersenjata itu secara keseluruhan telah melakukan tindakan yang tepat dan benar’. Di tahun 2005 Kabinet Balkenende melalui ucapan Menteri Luar Negeri Ben Bot menyampaikan penyesalan atas penderitaan yang diakibatkan, dan menyatakan bahwa Belanda telah melakukan perang ‘dengan berpijak pada sisi sejarah yang salah’. Jadi, suatu perang, yang setelah ditinjau di kemudian hari, dianggap seharusnya tidak dilakukan (begitu). Pada akhirnya di tahun 2011 Kabinet Rutte meminta maaf kepada janda-janda dari para lelaki Indonesia yang ditembak mati tanpa pengadilan di Desa

Rawagede di Jawa. Kemudian lagi-lagi menyusul permintaan maaf, yang setiap kali dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa khusus seperti di Sulawesi, tetapi tidak untuk tindakan serdadu Belanda dalam pengertian lebih luas.

Bahwa tindak kejahatan perang dilakukan oleh pihak Belanda adalah jelas. Sementara ini sudah muncul pelbagai penelitian yang mendokumentasikan kejahatan-kejahatan itu. Juga dalam media peristiwa-peristiwa yang baru dikemukakan, atau peristiwa yang sudah diketahui mendapat perhatian lagi. Namun, dalam skala mana dan di bawah kondisi apa ‘tindakan-tindakan di luar batas semacam itu’ betul terjadi – dan apakah istilah itu cukup mencakup – tetaplah tidak jelas dan menjadi perdebatan.

Para veteran memperdengarkan suara mereka dalam perdebatan ini. Itu masuk akal: mereka ada di sana waktu itu, mereka mengalami realita yang sebenarnya, mereka tahu apa yang dibicarakan. Namun, mereka sama sekali tidak bersuara sama, dan pastilah tidak jika menyangkut tindak kejahatan perang. Ada, dalam jumlah yang terbatas, yang sekarang juga masih memperdengarkan suaranya di media, dan dalam jumlah lebih banyak, mempublikasikan pengalaman-pengalaman mereka, atau menugaskan orang menerbitkannya. Setiap dokumen ego (*egodocumenten*) atau catatan pribadi itu masing-masing hanyalah kesaksian individual tetapi analisis yang sistematis dan tanpa prasangka dari korpus keseluruhan dapat memberikan gambaran yang lebih seimbang, dan dengan begitu juga gambaran yang lebih jelas dalam perang itu sendiri.

Itu merupakan titik tolak dari buku ini, didasarkan pada semua publikasi dokumen ego dari para serdadu yang bertugas dalam angkatan bersenjata Belanda di Indonesia antara 1945 dan 1950.¹ Korpus ini merupakan sumber yang unik – 659 buku harian, korespondensi, buku kenangan, memoar, sketsa biografis, teks dalam 100.000 halaman dengan isi kata-kata dari 1.362 tentara dan veteran. Itu adalah sumber yang perlu ditangani secara hati-hati – tentang hal itu akan lebih banyak ditemukan kemudian dalam buku ini – tetapi walaupun begitu sumber itu menyediakan cukup bahan sebagai sumbangan kuat bagi perdebatan tentang perang.

1 Secara resmi KNIL (Koninklijk Nederlands-Indisch Leger ‘Tentara Kerajaan Hindia-Belanda’) tidak termasuk dalam angkatan bersenjata Belanda (Nederlandse Koninklijke Landmacht/ KL ‘Angkatan Darat Kerajaan Belanda’ dan Nederlandse Koninklijke Marine/KM ‘Angkatan Laut Kerajaan Belanda’), tetapi angkatan bersenjata Hindia-Belanda. Namun, dalam situasi setelah perang, pembedaan resmi ini tidak ada lagi. Oleh karena itu, dalam buku ini, misalnya juga dalam reaksi pemerintah atas *Excessennota* (Nota Ekses), disebutkan tentang ‘angkatan bersenjata Belanda’ dengan KNIL tercakup di dalamnya.

Apa yang dihasilkan oleh penelitian ini? Pertama-tama adalah sebuah buku yang berisi pernyataan-pernyataan langsung dari para laki-laki itu, dan satu-dua perempuan, yang seringkali sangat memberi kesan mendalam, dalam formulasi-formulasi yang mereka pilih sendiri atau kuasakan pada orang lain. Dalam makna itu, buku ini merupakan bunga rampai. Cerita itu seolah-olah merupakan cerita yang utuh tetapi itu semu. Ada tema-tema yang dipilih atas dasar pemikiran bahwa tema-tema ini dapat membantu memahami perang dan cara pikir serta tindakan dari para serdadu itu. Dari sejumlah pasase yang melimpah ruah diseleksi kutipan-kutipan yang representatif dan memiliki kekuatan isi kata. Memang mungkin saja menambah lagi dengan ratusan halaman berisi kutipan-kutipan dengan nada dan isi yang serupa.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang keragaman yang sangat besar, suatu ragam yang luas tentang kenangan, pengamatan, visi, dan perasaan. Di dalamnya dapat diuraikan pola-pola. Pertama-tama tentang pertanyaan bagaimana para serdadu yang dikirim itu berpikir tentang misi yang harus mereka penuhi di suatu negeri yang sama sekali asing bagi mereka. Arah kecenderungannya jelas. Di awal misi tersebut dipikirkan dari sudut pembebasannya dan selanjutnya dipikirkan pelaksanaan penertiban dan pengamanannya, dan masih di waktu perang itu sendiri tumbuh sikap skeptis dan sinis. Terutama di tahun terakhir perang, ketika pelbagai perspektif dengan cepat memburuk, terjadi demoralisasi; ini dapat mengakibatkan tindak-tanduk kekerasan yang di luar jalur. Setelah perang, semakin banyak veteran yang meragukan arti dan manfaat perang.

Gambaran apa yang dimiliki oleh para serdadu Belanda itu tentang Indonesia? Kebanyakan dari para serdadu itu jelas-jelas hanya memiliki gambaran yang sangat samar tentang negeri dan masyarakatnya. Komentar tentang masyarakatnya beragam dari mulai adanya simpati melalui paternalisme dan eksotisme sampai rasisme yang blak-blakan. Secara positif dapat dikatakan: mereka ingin melindungi 'pribumi' terhadap musuh militer (TNI) yang biasanya digambarkan sangat negatif. Walaupun begitu, timbul juga sikap pengertian terhadap para perintis kemerdekaan. Sikap pengertian itu sudah dimiliki oleh sejumlah orang di tahun-tahun terakhir perang, sesudah perang lebih menguat lagi. Namun, cara lawan, atau lebih tepat lawan-lawan, melakukan perang terus saja dinilai negatif. Argumen bahwa musuh berperang secara tak diduga dan kejam juga di kemudian hari di kalangan sendiri dipakai sebagai pernyataan dan pembenaran untuk tindakan keras.

Mengenai angkatan bersenjata sendiri terdapat garis pemisah antara Angkatan Darat Kerajaan Belanda (KL) dan Angkatan Laut Kerajaan Belanda (KM) di satu pihak, Tentara Kerajaan Hindia-Belanda (KNIL) di lain pihak. Para serdadu Belanda menilai secara ambivalen baik metode keras dari para tentara KNIL maupun kolega-kolega mereka yang rekrutan lokal itu, yang dikatakan bahwa mereka itu berani, efektif, dan dengan begitu dibutuhkan, tetapi mereka itu seringkali juga melakukan tindak kekerasan. Politik Belanda banyak sekali dinilai negatif: pemerintah di Den Haag yang jauh tidak mengerti apapun tentang kenyataan di tempat, lemah dan tidak berprinsip, melenyapkan kesuksesan militernya di meja perundingan karena khawatir akan opini internasional.

Sebagian besar, antara 75 dan 80 persen dari semua tentara dan veteran tidak melaporkan tindak kejahatan perang, menyatakan secara eksplisit mereka bukanlah pelaku atau saksinya, dan/atau membantah tegas bahwa kejahatan-kejahatan itu memang terjadi. Hanyalah sebagian kecil saja yang menyebutkan tentang tindakan-tindakan kekerasan di luar jalur. Walaupun demikian, dalam korpus 659 dokumen ego teridentifikasi hampir 800 tindakan kejahatan perang, dari pembakaran dan perampokan dengan penganiayaan dan penyiksaan sampai pemberondongan atau penembakan individual dan kolektif. Separuh dari berita ini menyangkut korban mati, seperti eksekusi tanpa pengadilan dan penembakan tawanan 'yang melarikan diri'; kategori berikutnya, seperempatnya, menyangkut penganiayaan-penganiayaan. Ini merupakan data yang mengejutkan.

Pertanyaan-pertanyaan seputar laporan yang kurang lengkap dan representativitasnya dibicarakan secara rinci dalam buku ini. Merupakan ilusi berpikir bahwa waktu dapat dibuat suatu penetapan yang kuat tentang jumlah tindakan kejahatan perang yang dilakukan oleh para tentara angkatan bersenjata Belanda. Masuk akallah kalau segala acuan ke kejahatan-kejahatan yang ditemukan dalam korpus ini – yang disinyalir hanya oleh sekelompok kecil saja dari keseluruhan angkatan bersenjata – hanya merupakan bagian kecil dari hal yang besar yang bisa diketahui. Penghitungan dasar memberikan gambaran bahwa jumlah kejahatan perang haruslah ditaksir cenderung ke puluhan ribu daripada ribuan. Secara kolektif dan dalam konteks kontragerilya, angkatan bersenjata Belanda telah bersalah melakukan tindak kejahatan perang dalam skala yang signifikan; tindakan kekerasan yang melampaui batas ini terjadi secara struktural, bukan fenomena insidental saja, demikian seharusnya disimpulkan. Gambaran itu sangat berbeda dengan yang disampaikan oleh Kabinet De Jong pada tahun 1969, dan suatu kesimpulan yang hanya sesuai dengan citra diri

nasional negeri Belanda yang apik di mana tindakan kekerasan semacam itu hanyalah diasosiasikan dengan negara-negara lain.

Dengan ini sama sekali tidak boleh disimpulkan bahwa semua tentara terlibat dalam hal tindak kejahatan perang. Juga jangan pula mengartikan bahwa pimpinan militer secara sistematis mendorong tindakan kejahatan perang, sebagai praktik yang diperbolehkan. Tindakan seperti itu justru dilarang secara eksplisit. Mengenai pertanggungjawaban militer dan politik atas kejahatan berdasarkan korpus ini hanyalah bisa diberikan pernyataan-pernyataan secara hati-hati: tentang rantai komando tidak cukup ditemukan dalam dokumen ego, dan apalagi yang ada adalah pernyataan-pernyataan yang bertentangan. Boleh dikatakan bahwa para perwira (bawahan) yang lebih rendah diberikan sangat banyak keleluasaan. Sedikitnya nampak seolah-olah tindak preventif dan penghukuman atas kejahatan perang tidak mendapat prioritas utama, khususnya ketika konflik itu meruncing dan kemungkinan menang perang berbalik. Itu adalah kesimpulan yang memprihatinkan yang juga didapatkan oleh peneliti-peneliti lain, berdasarkan sumber-sumber yang sama sekali berbeda.

Di saat-saat tindakan kekerasan digambarkan, tindakan itu juga dipikirkan, baik di tempat maupun (jauh) di kemudian hari. Refleksi-refleksi itu beragam. Pernyataan-pernyataan dikemukakan yang kadang-kadang juga bersifat menuntut pembenaran: tantangan-tantangan yang tidak dapat diduga dari kontragerilya; keharusan mengambil keputusan cepat, *better safe than sorry*, tindak balas dendam terhadap perbuatan keji musuh. Ada juga keraguan, kadang-kadang penyesalan tentang perilaku sendiri atau tentang keterlibatan ikut bersalah yang dialami – dengan berjalannya tahun, jadi terutama dalam memoar dan catatan biografi, hal itu diungkapkan lebih sering dan lebih tegas.

Dua bab terakhir yang berdasarkan tema terutama dipusatkan untuk membahas tentang kehidupan serdadu dan juga periode kepulangan mereka dan khususnya saat sesudahnya. Sebanyak mungkin melalui dokumen-dokumen ego itu didapatkan informasi yang selama perang tidak, hanya sepintas atau sembunyi-sembunyi ditulis oleh para serdadu, seperti stres dan seks. Di mana sejumlah besar (mantan) tentara menempatkan tindak kekerasan eksesif itu dalam konteks *better safe than sorry*, maka wajarlah kalau ketakutan dan stres dapat dikaitkan dengan perilaku semacam itu. Praktik seks bayaran yang kebanyakan tidak diungkapkan, tetapi ternyata sudah meluas – pemerkosaan jarang sekali disebut – memberi kesan telah terjadi suatu penyimpangan dari norma-norma di rumah. Tidak tertutup kemungkinan adanya paralel di sini. Di mana keadaan perang

menyebabkan lepas kendali, dan penurunan batas normatif seks, maka ini juga bisa berlaku untuk penggunaan kekerasan yang melampaui batas.

Di dalam cerita-cerita dari para veteran yang lama sesudah kepulangannya (memberi kuasa untuk) menuliskan pengalaman dan perasaannya, kelihatan sekali adanya sikap telah diperlakukan secara tidak adil: tentang banyaknya penempatan paksa dalam perang yang sesudahnya dianggap sebagai suatu kesalahan, tentang tahun-tahun yang hilang sebagai warga sipil, tentang kurangnya penghargaan dari politik dan masyarakat, tentang ketidakmengertian, bahkan di lingkungan dekat mereka sendiri. Dalam konteks itu dokumen-dokumen ego itu seringkali lebih mengungkapkan – yang bisa dimengerti – keluh kesah diri daripada pencelaan diri. Lama-kelamaan trauma menjadi tema. Dan kekerasan dibicarakan berangsur-angsur dengan lebih terbuka dan kritis, walaupun juga mayoritas menyatakan bahwa mereka bukan saksi, apalagi pelaku kejahatan perang. Pernyataan yang terakhir itu menjelaskan adanya nada sengit dari para veteran dalam debat-debat kemudian yang membela diri terhadap apa yang mereka pandang sebagai tuduhan yang tidak beralasan.

Bagaimana hubungan antara titik-titik tera 1969-2005-2011 dan temuan-temuan itu dalam buku ini? Bahkan suatu kesimpulan yang disusun sangat hati-hati pun menguburkan titik tolak pemerintah tahun 1969 yang menyatakan bahwa kekerasan eksekutif hampir tidak pernah terjadi. Kesimpulan dari tahun 2005, bahwa setelah ditinjau kemudian Belanda seharusnya tidak menjalankan perang itu (begitu), adalah pada dasarnya suatu kesimpulan politik, dari perspektif ilmiah yang paling-paling dapat didukung dengan pernyataan bahwa semua perang dekolonisasi yang dilakukan oleh negeri-negeri induknya pada akhirnya mencerminkan pandangan dunia yang kuno dan seluruh perang itu gagal. Dari sudut pandang inilah anak judul buku ini dipilih dan dalam judul disebutkan 'Indonesia', bukan 'Hindia'.

Permintaan maaf yang disampaikan oleh pemerintah Belanda di tahun 2011 untuk tindakan kejahatan perang yang spesifik kembali menjadi tanda isyarat politik, lagipula dipaksa dalam ruang pengadilan. Para veteran Belanda mengecam permintaan maaf dari pemerintahnya dengan mengacu ke tindakan kejahatan perang yang dilakukan oleh pihak lawan. Bahwa pihak(-pihak) lawan telah bersalah melakukan kejahatan perang dalam skala yang besar dipandang jelas. Apakah karena itu *semua* pihak harus meminta maaf adalah pertanyaan yang lain, yang berkaitan dengan soal legitimasi perang itu sendiri dan dengan demikian pertanyaan siapakah agresor yang memancing tindak kekerasan balik –

tentang hal itu pada waktu itu terdapat perbedaan pendapat, tetapi juga setelah di belakang hari perbedaan itu masih ada. Pertimbangan itu, dan pertanyaan apakah permintaan maaf dan ganti rugi uang memang benar dan diinginkan, adalah suatu *perkara* politik dan bukanlah topik buku ini. Buku *Serdadu Belanda di Indonesia* ini memang memberikan kesan bahwa jika ada kemungkinan niat pemerintah selanjutnya memberi ganti rugi, maka itu akan menyangkut suatu jumlah tindak kejahatan perang yang lebih besar daripada yang selama ini disangka di Belanda.

Buku *Serdadu Belanda di Indonesia* tidak memberikan penilaian moral. Maksud penelitian ini adalah untuk merekonstruksi tanpa prasangka aspek-aspek perang yang hakiki dan cara mengatasinya dan dengan demikian memperlakukan dengan adil orang-orang yang membukukan segala pengalaman dan kenangannya atau yang menguasai ke orang lain untuk menyusunnya dalam buku. Dalam makna itu, *Serdadu Belanda di Indonesia* juga merupakan bukti penghargaan bagi para lelaki itu. Secara bersamaan diajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit berdasarkan cerita-cerita mereka dan kadang-kadang ditarik kesimpulan-kesimpulan yang menyakitkan, terutama tentang penggunaan dan pernyataan tentang tindak kekerasan ekstrem. Dari perspektif masa kini tidaklah bisa dihindari, bahkan diharuskan, bahwa pertanyaan-pertanyaan ini dibawa ke meja diskusi. Namun, *Serdadu Belanda di Indonesia* juga menjelaskan bahwa kebanyakan yang bersangkutan sudah selama perang, dan yang pasti sesudahnya, bergelut dengan segala pertanyaan ini. Tidak hanya pertanyaan tentang arti dan membenaran perang itu tetapi juga tentang penggunaan tindak kekerasan: di mana letak batasnya, untuk kolektif dan untuk diri sendiri?

Catatan untuk pembaca

Dalam buku asli

Kutipan-kutipan dialihkan dari dokumen-dokumen ego asli tanpa perubahan, kecuali perubahan-perubahan kecil pada tanda baca, pemakaian huruf besar dan kesalahan pengetikan yang penting. Dalam teks-teks lain untuk nama geografis dan orang digunakan ejaan bahasa Indonesia yang modern. Pada kutipan dari dokumen ego dicantumkan tanggal publikasi dan/atau catatan asli. Jenis sumber juga diberikan, seperti berikut:

anders: and
artikel: art
biografie: bio
brieven: brv
bundel: bdl
dagboek: dgb
gedenkboek: ged
interview: int
memoires: mem
roman: rom

Dalam buku terjemahan ini

Dalam buku terjemahan teks kutipan dari dokumen ego di buku asli dialihkan ke bahasa Indonesia dengan susunan kalimat paralel mungkin aslinya, dengan mengikuti kaidah bahasa Indonesia. Pemakaian tanda baca dalam teks terjemahan didasarkan atas kelaziman dalam bahasa Indonesia. Ejaan lama pada nama geografis dan orang dalam kutipan dari dokumen ego dipertahankan seperti dalam buku aslinya. Keterangan pada kutipan tentang tanggal publikasi dan/atau

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950

catatan asli serta jenis sumber juga dicantumkan dalam singkatan Indonesianya, seperti berikut:

artikel: art
biografi: bio
buku harian: bh
buku kenangan: bk
interview: int
kumpulan: kpln
lainnya: ln
memoar: mem
roman: rom
surat: srt

Di dalam teks terjemahan, dalam setiap bab pada penyebutan pertama dari istilah Belanda, disebutkan pertama istilah Belanda tersebut dan kemudian diikuti dengan terjemahan Indonesianya, misal: Genieveldcompagnie (Kompi Zeni), Oorlogsvrijwilliger (OVW, sukarelawan perang). Pada penyebutan kedua dan selanjutnya dalam bab tersebut digunakan terjemahan Indonesianya saja, kecuali pada *Excessennota* yang tetap dipakai istilah Belandanya dan ditulis miring karena istilah ini adalah judul buku. Demikian juga untuk penyebutan pertama pada nama resmi kesatuan militer Belanda, digunakan lebih dahulu istilah Belandanya dengan diikuti oleh singkatannya. Terjemahan Indonesianya diberikan sesudahnya dalam kurung, misal: Nederlandse Koninklijke Landmacht (KL, Angkatan Darat Belanda), Korps Speciale Troepen (KST, Korps Pasukan Khusus). Pada penyebutan selanjutnya dalam bab tersebut digunakan terjemahan Indonesianya dan kadang, jika dirasa lebih memperjelas, dalam kombinasinya dengan singkatan Belanda, misal: Angkatan Darat (Kerajaan) Belanda (KL), Korps Pasukan Khusus (KST). Dalam konteks terjemahan yang sudah jelas mengacu ke nama kesatuan Belanda, pada umumnya pada dokumen ego, seringkali cukup digunakan dalam kombinasi dengan singkatan Belandanya saja, misal: tentara KL, anggota KST.

1

Pendahuluan

Tujuh puluh tahun yang lalu, perang dekolonisasi Belanda-Indonesia berawal. Kini, di kedua negara hanya tinggal sedikit militer dari generasi terakhir, yang pada masa mereka direkrut masih merupakan pemuda hijau. Semua politikus dan pejabat tinggi militer dari masa itu – yang memang lebih tua usianya – sudah meninggal. Kadang-kadang ada veteran yang mau diwawancarai, dan ada beberapa dari mereka yang masih dalam proses menulis memoar, tetapi yang pasti semua kegiatan itu semakin berkurang saja. Rupanya, waktu tidak pernah berhenti menjalankan tugasnya. Kadang-kadang, keluarga mereka menemukan surat-surat atau buku harian dan bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengan itu semua. Mereka mungkin jadi menyalahkan diri sendiri karena dulu tidak lebih banyak bertanya kepada ayah atau kakek mereka tentang masa itu, tentang apa yang mereka alami di sana dan apakah masa itu membekas dalam hidup mereka, atau tidak.

Kanon sejarah Indonesia tidak dapat ditafsirkan secara lain: suatu revolusi yang sah di mana melalui suatu perjuangan heroik sekelompok suku bangsa bersatu memaksa penjajah bertekuk lutut dan berjuang bersama demi kemerdekaan mereka. Dalam kisah-kisah yang disajikan di museum nasional dan buku pelajaran sekolah masih sedikit ruang untuk nuansa itu. Hampir tidak ada refleksi tentang pertentangan-pertentangan internal yang mendalam dari Revolusi Indonesia di mana orang Indonesia bukan hanya berperang melawan kekuasaan kolonial tetapi juga berperang melawan sesama mereka sendiri, atau juga tentang orang Indonesia yang berpihak pada Belanda dan kadang-kadang berjuang untuk mereka. Kurang ada perhatian untuk proses perundingan dan dukungan yang krusial bagi para pejuang Republik dalam masyarakat internasional di bawah pimpinan AS. Cerita yang mendominasi salah satunya tentang kepahlawanan

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950

para militer. Memoar mereka, yang sebagian besar ditulis semasa rezim jenderal Suharto, dipenuhi dengan rasa kebanggaan. Bisa dimaklumi, karena mereka berbicara tentang peran mereka sebagai pemenang perjuangan yang sejalan dan setujuan. Tidak perlu diragukan lagi pasti juga ada kenangan-kenangan dan cerita-cerita lain, tetapi jumlahnya masih belum banyak dan cerita-cerita itu belum bisa tercakup dalam kanon sejarah Indonesia.

Tidak dapat dikatakan ada kanon sejarah Belanda yang jelas; ingatan Belanda tentang masa perang terpecah-pecah dan penuh dengan pertentangan-pertentangan. Perang ini tentu saja tidak dituliskan dengan rasa bangga dalam buku tahunan sejarah nasional Belanda. Wajar, karena perang itu berakhir dengan kegagalan total. Angkatan pertama militer mendaftarkan diri secara sukarela untuk mengusir si 'musuh Jepang' dari 'negeri Hindia kami', tapi rupanya di sana tidak ada pertempuran melawan Jepang. Orang Jepang sudah berkapitulasi sebelum pasukan pertama Belanda menjejakkan kaki di bumi Hindia. Setelah itu, pemulihan 'Orde en Vrede' (Ketertiban dan Perdamaian) dijadikan moto, tapi hal itu tidak berhasil dicapai, setidaknya tidak di setiap tempat dan yang pasti tidak permanen. Yang pada awalnya diperkenalkan sebagai aksi militer terbatas terhadap para pemberontak yang memiliki sedikit dukungan dari penduduk Indonesia, akhirnya menjadi perang betulan, suatu gerilya dan kontragerilya dengan ukuran besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Belanda. Perang yang pada awalnya juga didukung secara luas dalam politik Belanda, tetapi yang makna dan legitimasinya dalam dasawarsa berikutnya semakin dipertanyakan – berpuncak pada deklarasi pemerintah Belanda tahun 2005, yang menyatakan bahwa setelah ditinjau kembali ternyata negara kami berada 'pada sisi sejarah yang salah'. 'Kami' pada waktu itu belum mengerti bahwa zaman telah berubah selamanya, bahwa peran kami di Indonesia sudah berakhir.

Tapi kenangan dan penilaian tetap sangat terpecah dan perdebatan tentang tahun-tahun 1945-1950 terus membangkitkan emosi yang kuat, setidaknya di antara kelompok terakhir yang mengalami sendiri periode tersebut dan kerabat keluarga mereka: bukan hanya para veteran dan anak-anak mereka, tetapi juga keluarga dari 'para repatrian' yang telah kehilangan negeri Hindia mereka dan harus menukar Republik Indonesia yang baru dengan Belanda. Mereka terus-menerus dihadapkan dengan pendapat-pendapat bahwa kolonialisme Belanda di Hindia bukan tindakan yang benar, dan karena itu orang-orang yang ada di sana pada masa sebelum perang juga menjadi tersangka dan dituduh 'salah',

seperti juga mereka yang setelah masa perang membela orde kolonial melawan nasionalisme.

Tuduhan salah tersebut menimpa baik para repatrian maupun para veteran, yang oleh karena itu merasa diri mereka bersama-sama didudukkan di kursi tersangka – beberapa dari mereka tetap merasakan perasaan itu hingga saat ini. Banyak dari mereka, dengan atau tanpa perasaan pahit, hanya mengangkat bahu dalam menanggapi banyaknya kesalahpahaman, beberapa dari mereka menentang mati-matian melawan apa yang mereka anggap sebagai prasangka dan kurangnya pengetahuan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada masa itu. Dan dalam hal itu mereka sering benar: cara banyak orang yang di belakang hari memberikan penilaian yang menghakimi tentang suatu periode yang sebenarnya hanya sedikit mereka ketahui adalah sangat mudah. Memang boleh dikatakan memalukan, tapi tidak mengherankan. Sebenarnya seperti halnya semua sejarah kolonial Belanda, perang ini juga hanya sedikit menjadi bagian dari kesadaran nasional. Baru-baru ini sajalah hal itu mendapat lebih banyak perhatian dalam dunia pendidikan, media, dan kehidupan budaya.

Perang kolonial

Militer dilatih untuk berperang. Perang-perang yang sering dipandang perlu untuk membela negara sendiri, sekutu, atau untuk membuat dunia lebih aman. Dahulu keadaannya berbeda, tetapi kini tidak ada negara yang secara eksplisit memberikan tugas agresif kepada bala tentaranya sendiri – ‘pertahanan’ adalah semboyan masa kini. Hal ini tentu berlaku untuk angkatan bersenjata Belanda, yang sebagai anggota NATO pada pascaperang terutama mendapatkan tugas-tugas pertahanan. Dalam beberapa dasawarsa terakhir, angkatan bersenjata Belanda semakin sering terlibat dalam misi perdamaian internasional. Operasi itu, selalu dalam konteks internasional, sering berkarakter misi pembangunan: suatu kombinasi dari penjagaan perdamaian dan peningkatan pembangunan lokal. Dengan begitu para militer bukan hanya dilatih untuk bertempur secara militer, tetapi juga untuk melakukan pekerjaan pembangunan.

Berdasarkan keyakinan dan kepentingan pribadi yang bisa dimengerti, sejak abad kesembilan belas sampai pada masa pendudukan Jerman pada tahun 1940, Belanda menggolongkan dirinya sebagai negara netral dengan ambisi militer utama untuk melindungi perbatasan negara sendiri. Pada masa antarperang, Belanda tidak mempunyai budaya militer yang kuat; juga tidak

setelah tahun 1945, walaupun pada masa itu status netralnya sudah ditinggalkan. Meskipun begitu, pada tahun-tahun pertama setelah Perang Dunia II, Kerajaan Belanda melancarkan operasi militer terbesar dalam sejarahnya, bukan di Eropa tapi di tanah jajahan Hindia-Belanda. Misi yang diperintahkan kepada para militer memang bersifat kolonial dan dilakukan demi kepentingan ekonomi dan geopolitik Belanda yang tidak dapat dianggap sepele, tetapi kalau dilihat dari konteks kehidupan sekarang, sifat misi tersebut lebih biasa dan kontemporer daripada yang mungkin dapat diduga. Moto yang digunakan adalah pemulihan ketenangan dan keamanan, menciptakan tuntutan-tuntutan yang dibutuhkan untuk pembangunan kembali setelah adanya pendudukan asing yang menghancurkan. Pekerjaan pembangunan dengan tujuan yang mengingatkan pada misi penjaga perdamaian masa kini, termasuk memerangi para 'ekstremis' dan 'teroris'.

Kenyataan yang sebenarnya adalah lebih rumit, dan ada sejarah awal kolonial di mana dahulu angkatan bersenjata di daerah kolonial dibebani tugas yang sangat berbeda daripada tugas yang biasanya di Belanda. (Koninklijk) Nederlands-Indisch Leger (KNIL) yang didirikan pada tahun 1830 menjalankan serangkaian panjang aksi militer dan perang dalam rangka 'pasifikasi' di Nusantara. KNIL dan juga polisi – yang keduanya dipimpin oleh orang Belanda dan sebagian besar diperkuat oleh orang-orang keturunan Eropa (Indo) dan orang-orang Indonesia – diperlukan untuk memelihara ketertiban dan keadaan tenang. Yang dimaksud adalah ketertiban dan keadaan yang relatif tenang menurut definisi yang lazim buat suatu negara kolonial yang terus-menerus menjadi semakin besar, suatu negara yang mandatnya tidak ada selain dari kewajaran dalam cara bagaimana 'negara induk' serta penduduk Eropa di Nusantara menganggap 'Orde Kolonial' itu sebagai sesuatu yang lazim.

Di daerah tanah jajahan pemikiran itu berangsur-angsur berubah, sudah dimulai sebelum pecahnya perang dan yang pasti setelahnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, dua hari setelah Jepang berkapitulasi, Sukarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan Republik Indonesia. Dan di saat itu pula dimulai aksi militer Belanda terbesar, yang dipertanggungjawabkan sebagai suatu misi 'Voor Orde en Vrede' (Untuk Ketertiban dan Perdamaian), tetapi yang tentu di luar Belanda semakin dianggap sebagai perang kolonial murni. Hal itu tidak mengherankan. Sudah jelas bahwa motif Belanda sebagian dapat dikatakan bersifat paternalistis, tetapi juga ada motif lain yang jelas-jelas memiliki kepentingan geopolitik dan terutama ekonomi: Negeri Belanda yang menjadi sangat miskin

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950

setelah pendudukan Jerman khawatir kalau tanpa adanya hubungan kuat dengan 'Hindia' tidak bisa menyelamatkan diri.

Bagi para militer KNIL, jumlahnya antara 70 – 80.000 orang, situasinya juga terasa baru: mereka harus membangun kembali pasukan mereka sesudah pendudukan Jepang, lalu mereka harus bekerja sama dengan bala tentara Belanda yang jumlahnya secara cepat lebih besar daripada mereka itu, dan bahkan dalam perang Aceh sebelumnya belum pernah terjadi pertempuran yang sebegitu besar-besaran dan penuh kekerasan demi memperebutkan kedaulatan. Bahwa kekerasan harus digunakan untuk memerangi 'pemberontakan', bukanlah hal yang baru bagi KNIL.

Bagi kebanyakan militer yang baru didatangkan dari Belanda, semuanya justru merupakan hal baru. Bukan hanya daerah tropis, daerah yang penduduk setempatnya digambarkan sebagai masyarakat yang mempunyai mentalitas dan suasana hati yang sulit diduga, tetapi yang terasa baru untuk kebanyakan dari mereka juga fakta nyata bahwa mereka adalah militer dan harus bertindak sebagai militer. 100.000 dari 150.000 orang Belanda yang ditempatkan di Indonesia antara tahun 1945 dan 1950 adalah tentara wajib militer. Mereka adalah pemuda hijau tanpa pengalaman militer. Sangat mungkin saja mereka sudah pernah melihat cara kerja tentara Belanda pada masa '*meidagen*'¹ tahun 1940, sesudah itu empat sampai lima tahun melihat aksi dari tentara Jerman, dan kemudian juga tentara Sekutu. Namun, berbeda dengan para tentara profesional yang jumlahnya sangat terbatas dan para sukarelawan perang, anak-anak muda tersebut sampai sesaat sebelum mereka naik kapal belum pernah memegang senjata, dan juga tidak pernah mengikuti pendidikan militer.

Misi yang ditugaskan pada mereka saat dikirim ke Hindia, digambarkan sebagai pekerjaan yang bertujuan perdamaian dan pembangunan masyarakat. Bahwa mungkin akan ada keterlibatan dengan kegiatan perang juga jelas bagi mereka. Tetapi lama, ukuran, dan intensitas dari apa yang pada akhirnya memang menjadi perang yang sebenarnya, adalah hal yang sama sekali berbeda dari dugaan mereka. Di pihak Belanda hampir semua pihak – politik, militer, opini publik – pada awalnya mempunyai perkiraan yang terlalu optimis; butuh waktu lama sebelum mereka menyadari hal yang sebenarnya terjadi, dan kemudian menjadi jelas bahwa ternyata *exit strategy* belum tersedia.

1 Masa penyerbuan Jerman ke Belanda di bulan Mei 1940.

Tidak pernah ada perang yang bersih, dan terutama perang berkarakter gerilya dan kontragerilya seringkali kotor. Pengertian kata 'bersih' saja sudah merupakan konsep yang sulit. Andai saja perang bisa diterima, di mana batas antara tindakan perang 'biasa' dan kejahatan perang yang tidak diperbolehkan? Dan apakah hubungan intensi pihak yang berperang dengan hal itu? Apakah ke(tidak)absahan aksi militer Belanda bisa mempunyai konsekuensi untuk evaluasi kekerasan di belakang hari? Apakah kekerasan itu sudah tentunya harus dianggap 'salah' karena sekarang, (lama) setelah kejadian itu berlalu, tampaknya menjadi konsensus bahwa perang ini merupakan refleksi kolonial yang 'salah' dan tidak bijaksana? Itu semua merupakan pertanyaan retorik yang bernada moralistis. Pendekatan dalam buku ini berbeda – buku ini mengemukakan pertanyaan-pertanyaan analitis tentang sifat dan frekuensi kejahatan perang, tentang konteks pelaksanaan tindakan itu, dan tentang bagaimana pemikiran orang-orang yang terlibat tentang hal itu, pada masa itu sendiri dan di belakang hari.

Jalannya perang

Ketika Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945 dan dua hari kemudian Republik Indonesia diproklamasikan, tidak ada tentara Belanda di Jawa dan Sumatra. Ketertiban itu harus dijaga oleh koalisi yang agak ganjil yang terdiri dari pasukan Inggris – bagian dari South East Asia Command (Komando Sekutu Asia Tenggara) – yang mendarat pada bulan September dan tentara Jepang yang telah dikalahkan. Pimpinan militer Inggris di Asia Tenggara di bawah komando Lord Louis Mountbatten menyadari bahwa ada perlawanan kuat di wilayah-wilayah Indonesia terhadap pemulihan tatanan kolonial, dan juga menyadari bahwa kekuatan militer mereka jauh dari memadai. Oleh karena itu, yang dijadikan pegangan mereka adalah pengendalian diri agar tidak membangkitkan agresi Indonesia dan menjaga jarak dengan pemerintah Hindia-Belanda yang ingin dengan segera tanah jajahan tersebut berada di bawah kontrol mereka lagi.

Tetapi pasukan Inggris tidak berhasil mempertahankan ketertiban, dan mereka sendiri juga tidak berhasil untuk tetap berada di luar pertempuran itu. Oleh para politikus Republik Indonesia dan para militer, pasukan Inggris dipandang sebagai kaki tangan kolonialisme Belanda, yang bagaimanapun kehadirannya tidak dikehendaki. Di berbagai tempat, terutama di Surabaya, pada akhir Oktober - awal November 1945 berlangsung suatu pertempuran yang menewaskan ratusan tentara dari pihak Inggris dan dalam jumlah yang berlipat

ganda dari pihak pejuang Indonesia. Bagi Inggris peristiwa itu tidak bakalan mendatangkan kehormatan atau keuntungan strategis. Maka, antara Juni dan Desember 1946 semua pasukannya meninggalkan Indonesia. Pada waktu itu Belanda juga sudah menghadirkan militernya kembali di Nusantara, meskipun kehadiran mereka di Jawa dan Sumatra sampai musim panas 1947 masih dibatasi dengan beberapa enklave saja (di dalam dan sekitar kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Palembang). Sementara Inggris pada waktu itu segera merundingkan perdamaian, dan meyakinkan pendapat bahwa kembali ke *status quo* kolonial praperang dengan semakin bertambahnya hari semakin tidak terpikirkan, penguasa Belanda malah berpendapat yang sebaliknya. Pemulihan ketertiban di bawah kekuasaan Belanda adalah prioritas; apakah dan bagaimana kemudian harus bekerja sama dengan kaum nasionalis masih lama menjadi isu perdebatan antara para pemimpin sendiri dan antara lapisan atas para pejabat pemerintah dan militer.

Setengah tahun pertama setelah Jepang menyerah, situasi di sebagian besar Nusantara ditandai dengan pertempuran sengit demi kekuasaan – kebijakan politik memecah-belah dan menguasai (*divide et impera*) dari Jepang sangat memicu terjadinya pertempuran itu. Pada waktu itu terjadi bentrokan-bentrokan keras antara kelompok-kelompok masyarakat Indonesia yang saling bersaing, juga terjadi tindakan kekerasan terhadap etnis minoritas – generasi pertama dan kedua imigran Eropa, kelompok yang lebih besar dari orang campuran Indonesia-Eropa (Indo) – dan juga kekerasan terhadap ‘pribumi’ yang dipandang sebagai kolaborator. Kekerasan yang terjadi selama masa Bersiap adalah sangat mengerikan. Perkiraan jumlah orang Eropa yang dibunuh berkisar antara 3.500 sampai 20.000 orang lebih – perkiraan angka yang jauh berbeda ini memperlihatkan kekacauan sosial dan administrasi pada periode itu. Angka jumlah pembunuhan Peranakan Tionghoa, yang telah tinggal selama beberapa generasi di daerah tanah jajahan itu, hanya bisa ditebak. Di masa itu terjadi penjarahan dan pembunuhan. Peristiwa pembunuhan tersebut disertai penyiksaan keji dan pemerkosaan.

Di belakang hari peristiwa itu dikaitkan dengan genosida. Secara analitis kaitan itu satu langkah terlalu jauh; pada masa itu tidak ada upaya untuk memusnahkan seluruh penduduk Eropa atau Cina. Juga tidak bisa dianggap bahwa kekerasan masa Bersiap itu sengaja diatur dan dikendalikan oleh para pemimpin Republik. Namun, bukan berarti bahwa periode ini tidak memperuncing hubungan. Sejak masa itu, kepentingan pemulihan ketertiban di pihak Belanda juga dilegitimasi dengan mengacu pada kepentingan untuk

menghindari terulangnya kembali peristiwa Bersiap. Selain itu balas dendam atas nama anggota keluarga dan teman dari para anggota KNIL yang disiksa dan dibunuh menjadi motif mereka untuk kekerasan yang kemudian terjadi.

Periode Bersiap pada umumnya terjadi antara September 1945 dan awal 1946. Tentara Inggris, didukung oleh tentara Jepang, bertanggung jawab atas ketertiban, tetapi mereka tidak berhasil memelihara ketertiban itu dengan baik. Di bawah pimpinan Letnan Gubernur-Jenderal Huib van Mook, kekuasaan pemerintahan Hindia-Belanda berada lagi di Batavia/Jakarta pada Oktober 1945. Seperti juga pada sebelum masa pendudukan Jepang, pemerintah Hindia-Belanda memiliki otonomi tertentu terhadap kebijakan politik Belanda, tetapi dalam praktiknya 'Batavia' semakin tergantung pada pemerintah Belanda di Den Haag. Pemerintah Hindia tidak memiliki kekuatan militer dan polisi untuk bisa memerangi Republik Indonesia dengan kuat. Pembangunan angkatan polisi sudah pasti tidak akan berhasil.

Pembangunan kembali tentara dan angkatan laut adalah cerita yang lain. Sebelum Jepang menyerah, tentara KNIL sudah dihidupkan kembali, meskipun masih berada dalam pengasingan di Australia. Pada bulan-bulan berikutnya, pasukan tentara profesional kolonial dibangun, baik dari para militer sebelum perang, yang kebanyakan bekas tahanan perang yang baru saja dibebaskan, maupun dari para sukarelawan baru. Kekuatan militer itu pada akhir tahun 1946 ada 37.000 orang, dua tahun kemudian bahkan mencapai 60.000 orang; antara tahun 1945 dan 1950, KNIL diperkirakan terdiri dari sekitar 75.000 – 80.000 orang. Peningkatan pasukan dari Belanda tertunda lebih lama, oleh karena Inggris menahan proses debarkasi mereka. Batalyon-batalyon lengkap pertama dari para sukarelawan perang Belanda baru tiba pada bulan Maret 1946, pasukan pertama dari para wajib militer, Divisi pertama '7 Desember' baru tiba pada musim gugur 1946. Di Den Haag menjadi jelas bahwa pertempuran itu akan berlangsung lebih lama dari yang sebelumnya diperkirakan, dan juga menjadi jelas bahwa jika hanya KNIL bersama para sukarelawan perang saja, maka mereka tidak akan bisa memperbaiki keadaan. Oleh karena itu, pada musim semi 1946 undang-undang dasar diubah agar para wajib militer juga bisa dikerahkan. Pada akhirnya akan ada 100.000 wajib militer Belanda yang dikirim ke Hindia, di samping sekitar 30.000 sukarelawan perang dan sekitar seribu tentara profesional. Selain itu di kepulauan Nusantara, ada puluhan ribu tentara KNIL rekrutan. Jadi jumlah totalnya, termasuk beberapa penghitungan tumpang tindih, sekitar 220.000 orang, hampir semuanya laki-laki: 120.000 dari Koninklijke Landmacht (KL,

Angkatan Darat), 75-80.000 dari KNIL dan 20.000 dari Koninklijke Marine (KM, Angkatan Laut).²

Jumlah terbesar aparat militer dicapai pada semester pertama tahun 1948, ketika berbagai bagian pasukan itu bersama-sama berjumlah sekitar 150.000 tentara, termasuk para KNIL; kemudian dimulai pemulangan angkatan pertama, yang sementara itu telah menjadi para sukarelawan perang yang sangat berpengalaman. Dari 220.000 orang itu, sekitar 160.000 berasal dari Belanda, atau termasuk kelompok yang di Hindia-Belanda digolongkan sebagai masyarakat 'Eropa', dan 60.000 pribumi.

Sebagai bagian dari KNIL ada 'pasukan-pasukan khusus', komando-komando yang jumlahnya tidak pernah lebih dari seribu, tetapi mempunyai arti yang sangat penting, yaitu pasukan Depot yang kemudian menjadi Depot Speciale Troepen/Korps Speciale Troepen (DST/KST, Depot Pasukan Khusus/Korps Pasukan Khusus), 'Baret Hijau' yang dihubungkan dengan nama Kapten Raymond Westerling; dan 'Baret Merah' yang merupakan pasukan paramiliter. Berbeda dengan angkatan bersenjata bagian Belanda, pasukan KNIL termasuk DST/KST di segi etnis beragam, setidaknya mereka yang berpangkat rendah. Pangkat tertinggi diduduki oleh orang-orang Belanda, di bawahnya terutama militer yang direkrut secara lokal. Sebagian merupakan orang-orang yang secara hukum adalah 'orang Eropa', baik Belanda totok, yaitu orang berkulit putih yang lahir di Hindia, maupun kaum Indo, yaitu orang dari keturunan Eropa-Asia. Sebagian lainnya lagi terdiri dari mereka yang disebut sebagai 'pribumi': orang-orang Jawa, Maluku atau Ambon, Manado, dan Madura.

Pemerintah Belanda dan Hindia-Belanda, meskipun keengganan besar mereka terhadap orang Republik dan terutama terhadap 'kolaborator' Sukarno, segera paham bahwa bagaimanapun juga mereka harus berbicara bersama dan akhirnya berunding. Tindakan ini perlu dilakukan karena opini publik internasional sudah semakin kritis terhadap upaya Belanda untuk mengembalikan *status quo* kolonial atau setidaknya bisa mengatur masa peralihan bertahap menuju masa hubungan-hubungan pascakolonial. Yang mempunyai arti besar menuju upaya itu adalah suatu perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 15 November 1946 di Linggarjati. Hanya dari perundingan-perundingan untuk mencapai persetujuan itu saja mengimplikasikan bahwa Den Haag – yang didesak

2 Jumlah total 220.000 adalah jauh lebih tinggi dari perkiraan yang biasanya (200.000); lihat di situs laman untuk keterangan lebih lanjut mengenai angka-angka yang dikaitkan dengan kekuatan perang: <http://www.kitlv.nl/research-projects-dutch-military-operations-in-indonesia/>

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950

oleh Van Mook – mau tidak mau telah menerima kaum nasionalis sebagai lawan bicara dan juga menyadari bahwa kemerdekaan itu dalam waktu dekat tidak terelakkan lagi. Pada gilirannya orang-orang Republik, setidaknya pada saat itu, menunjukkan kesediaan mereka, juga di masa depan, untuk memberikan peran khusus kepada Belanda mengenai hal yang berkaitan dengan Indonesia.

Dalam perjanjian Linggarjati Belanda mengakui Republik Indonesia, tetapi hanya di Jawa, Madura, dan Sumatra, sebagai salah satu negara bagian dari negara federal Indonesia Serikat, yang pada gilirannya juga menjadi bagian dari Uni Indonesia-Belanda, dengan Belanda sebagai kepala Uni. Di kedua pihak para perunding telah berjalan jauh, yang kemudian ternyata terlalu jauh. Di Den Haag serangkaian persyaratan tambahan dirumuskan oleh Majelis Rendah Belanda. Persyaratan yang menurut para pakar tidak akan dapat diterima oleh Republik. Penentang persetujuan mendapatkan dukungan dari masyarakat yang masih menunjukkan sedikit pengertian terhadap hubungan baru itu. Meskipun Parlemen Republik menyetujui kesepakatan dalam sidang umum, tetapi di Indonesia perlawanan terhadap perjanjian asli begitu besar sehingga sangat dipertanyakan apakah perjanjian itu akan bisa bertahan – meskipun pertanyaan itu sudah tidak punya arti lagi dengan adanya perkembangan di Den Haag.

Di belakang hari sebenarnya sangat disayangkan bahwa Perjanjian Linggarjati tidak sampai jadi dilaksanakan. Pilihan lainnya pada waktu adalah melanjutkan dan memperluas perang. Perang itu tidak hanya terbatas pada dua 'aksi polisional'. Aksi tersebut dinamakan demikian untuk menekankan bahwa aksi itu bukan merupakan perang kemerdekaan, tetapi suatu aksi untuk melawan gangguan-gangguan dalam negeri yang berkaitan dengan ketertiban umum. Aksi pertama (21 Juli sampai 5 Agustus 1947) dan yang kedua (19 Desember 1948 sampai 5 Januari 1949) kelihatannya memang memperlihatkan bahwa tentara Belanda, setidaknya dalam jangka pendek, bisa memenangkan perang konvensional terbatas itu secara meyakinkan. Terutama pada aksi kedua, untuk pertama kalinya sebagian besar daerah-daerah di Jawa dan Sumatra secara resmi diduduki. Namun, aksi tersebut menempatkan Belanda pada opini internasional di kursi terdakwa. Sama sekali tidak membantu ketika selama aksi polisional kedua para tokoh pemerintah Republik di bawah pimpinan Sukarno ditangkap di Yogyakarta.

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950

Selain itu, menjadi semakin jelas bahwa sayap militer dari pemerintahan Republik, Tentara Nasional Indonesia (TNI)³, dan juga berbagai kelompok pejuang lainnya menjadi ancaman yang jauh lebih besar karena mereka memilih berperang secara gerilya. Strategi 'pelelahan tenaga lawan' tersebut memancing Belanda untuk melakukan kontragerilya, yang bukan saja menuntut lebih banyak korban daripada perang selama kedua aksi polisional yang singkat itu, tetapi juga semakin mengurangi kemungkinan bisa menang. Sementara itu, kontrol militer Belanda yang sesungguhnya sangat terbatas, meskipun aksi-aksi polisional sepertinya telah memberikan keberhasilan. Kekuatan militer yang besar itu masih tetap terlalu kecil untuk daerah yang begitu luas, di mana ketertiban kolonial harus dijaga, dan terlebih lagi mereka di sana tidak berhasil untuk menata kembali aparat sipil masa sebelum perang. Masalah itu sudah mulai dirasakan setelah aksi polisional yang pertama dan hanya semakin menjadi lebih parah ketika aksi kedua wilayah yang resmi di bawah kekuasaan Belanda menjadi diperluas. Bukan hanya para perunding, tetapi juga para militer dihadapkan pada tugas yang tidak mungkin bisa dicapai – tetapi kesadaran tersebut datang terlambat, terutama bagi komandan tentara Simon Spoor dan stafnya.

Akhirnya perang dekolonisasi juga diakhiri di meja perundingan. Pada tanggal 17 Januari 1948, jauh sebelum aksi militer kedua, di sebuah kapal perang Amerika Renville ditandatangani perjanjian yang sebagian besar isinya hampir sama dengan perjanjian Linggarjati yang empat belas bulan sebelumnya ditandatangani oleh kedua belah pihak dan selama empat belas bulan itu ada ribuan korban mati. Tetapi Renville juga tidak bisa berhasil seperti halnya Linggarjati. Enam belas bulan kemudian, pada tanggal 7 Mei 1949, para perunding Mohamed Roem dan Jan Herman van Roijen menandatangani perjanjian yang kemudian betul-betul menjadi dasar untuk penyerahan kedaulatan, yang akhirnya terjadi pada 27 Desember 1949. Sejak Linggarjati, Belanda harus banyak menyerahkan kekuasaannya. Sekarang tidak ada lagi pengawasan Belanda dalam masa perubahan menuju kemerdekaan. Namun, pemerintah Republik masih menyetujui negara federal Indonesia, di mana Republik Indonesia, meskipun terbesar, tetapi bukan satu-satunya mitra, dan juga menyetujui Uni Belanda-Indonesia. Hanya delapan bulan setelah penyerahan kedaulatan, pada tanggal 17 Agustus 1950, Sukarno akan menggantikan federasi dengan negara kesatuan.

3 Pasukan Republik berturut-turut disebut sebagai TKR (Tentara Keamanan Rakyat), TRI (Tentara Republik Indonesia), dan TNI (Tentara Nasional Indonesia). Di dalam buku ini dipakai sebutan TNI.

Pada tahun 1956 Sukarno juga menghapus Uni secara sepihak. Aksi-aksi tersebut tidak menguntungkan hubungan bilateral, dan sama halnya dengan penguasaan Irian Barat oleh Den Haag, yang di bawah tekanan berat internasional, baru pada tahun 1962 diserahkan kepada Indonesia, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dengan persyaratan referendum yang diadakan belakangan.

Secara militer pertempuran ini sudah berakhir sebelumnya. Perjanjian Roem-Van Roijen pada bulan Juni 1949 diikuti dengan kembalinya Sukarno dan Hatta ke Yogyakarta dan gencatan senjata pada tanggal 3 Agustus. Perdamaian yang sesungguhnya belum terjadi. Sampai pada penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember dan bahkan setelah itu masih ada banyak pertempuran, beberapa juga memakan korban jiwa. Yang memang terjadi adalah dimulainya pemulangan pasukan Belanda, meskipun pemulangan pasukan militer yang terakhir baru terjadi pada awal 1951 – lebih awal dari waktu itu adalah tidak mungkin karena kapasitas kapal tidak memadai. KNIL dibubarkan secara keseluruhan; sebagian kecil dari anggota KNIL Maluku dikapalkan ke Belanda dan didemobilisasi di sana. Pada bulan Januari 1950 ada percobaan kudeta dari pasukan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang dibentuk atas inisiatif dan dipimpin sendiri oleh Kapten Westerling untuk menentang Sukarno. Namun kudeta itu gagal total. Jadi semuanya sudah berlalu. Mantan kapten KNIL yang bertindak sepenuhnya atas inisiatif sendiri, diselundupkan ke luar negeri dengan perlindungan Belanda. Para militer lain yang terutama berasal dari Maluku dan yang telah mendukung Kapten tersebut dalam aksi sia-sianya itu, ditinggalkan di sana menanggung nasib mereka sendiri.

Jumlah korban jiwa di Indonesia yang berasal dari dinas militer Belanda (KL, KM, KNIL) pada periode 1945-1950 ditetapkan sebanyak 4.751 orang: 2.526 tewas di medan pertempuran dan 2.225 tewas dalam situasi lain; dari bulan Desember 1949-1951 masih ditambahkan lagi dua sampai tiga ratus korban jiwa. Angka ini jelas-jelas belum termasuk jumlah korban mati pada badan-badan bala bantuan, Palang Merah, anggota polisi dan lain-lainnya yang sejenis itu. Pada monumen Nasional Hindia-Belanda di Roermond jumlah korbannya tertera 6.226 jiwa. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah korban di pihak Indonesia, yang biasanya diperkirakan sekitar 100.000 jiwa, yang hampir setengahnya tewas setelah aksi polisional kedua (Groen 1991: 262). Namun, jumlah tersebut tetap merupakan perkiraan kasar saja. Perlu dicatat bahwa pada perkiraan korban perang Indonesia ada banyak sekali korban mati yang bukan

disebabkan oleh kekerasan Belanda, tetapi oleh karena tewas dalam pertempuran antar berbagai pihak Indonesia sendiri yang saling bertikai.

Ada beberapa pola yang bisa dikenali sebagai latar belakang jumlah korban jiwa mati di kedua pihak yang disebabkan kekerasan militer. Secara geografis, pusat pertempuran ada di Jawa, dan oleh karena itu jelas bahwa sebagian besar korban jiwa terjadi di sana. Secara kronologis, korban jiwa yang paling banyak jatuh pada periode terakhir, pada paruh pertama tahun 1949. Kenyataan itu membuat semuanya lebih tragis karena pada waktu itu sudah jelas bahwa Belanda tidak akan memenangkan perang, tidak dalam perang kontragerilya dan juga tidak di meja perundingan.

Kejahatan perang?

Perdebatan tentang perang di Indonesia dan terutama andil Belanda di dalamnya sering dipusatkan pada pertanyaan apakah pada waktu itu ada ‘kekerasan eksekusif’ yang dilakukan. Itu merupakan limitasi yang membutuhkan dua penjelasan. Pertama, diskusi ini harus dipisahkan dari pertanyaan apakah aksi militer Belanda itu bisa dibenarkan. Tentu saja, Republik Indonesia selalu berpandangan bahwa intervensi Belanda dahulu itu adalah suatu refleksi kolonial yang tidak dapat diterima, dan memang benar, pemerintah Belanda pada tahun 2005 mengambil jarak dari kebijakan yang dijalankan pada masa itu. Namun demikian, secara analitis tidak ada gunanya untuk sebelumnya mencap semua tindakan Belanda pada waktu itu merupakan tindakan yang melampaui batas. Tindakan Belanda itu harus dipahami dalam konteks yang pada masa itu, setidaknya dari pihak Belanda, diberikan: melindungi penduduk, memulihkan ketertiban dan perdamaian.

Kedua, debat umum seringkali dilakukan dengan ceroboh dalam hal pengertian seperti ‘melampaui batas’ atau kekerasan yang ‘eksekusif’ dan ‘kejahatan perang’. Dalam semua perang pasti ada korban jatuh. Para korban yang jatuh langsung di medan pertempuran antara pihak-pihak yang berperang, dianggap sebagai sesuatu yang tidak terelakkan, yang dalam konteks perang dianggap normal. Semua bentuk-bentuk kekerasan – terhadap tawanan perang, terhadap penduduk sipil – harus dinilai secara lebih kritis sesuai dengan hukum perang. Yang dijadikan acuan di sini adalah Konvensi-konvensi Den Haag 1864 dan 1907 serta empat Konvensi Jenewa yang ditetapkan sejak tahun 1864, dan terutama Konvensi tahun 1949 dengan beberapa tambahan di kemudian hari,

yang sekarang didukung oleh semua negara di dunia. Tiga pertama dari Konvensi Jenewa bertujuan melindungi para militer korban luka atau yang ditawan, yang keempat bersangkutan dengan warga yang menjadi korban perang. Secara keseluruhan konvensi tersebut memberikan kerangka yang mendefinisikan apa yang bisa dan yang tidak bisa diterima dalam situasi perang, serta kemungkinan untuk bisa menuntut pelanggaran-pelanggaran kode ini sebagai kejahatan perang di Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag.

Konvensi Keempat menetapkan bahwa konvensi-konvensi tersebut tidak hanya mengacu pada konflik bersenjata antara negara-negara, tetapi juga di dalam negara. Dengan demikian, tercipta kemungkinan untuk juga menguji tindakan para tentara kolonial dan anti-kolonial. Suatu komplikasi hukum dalam kasus perang dekolonisasi di Indonesia adalah bahwa konvensi baru ditandatangani pada tanggal 12 Agustus 1949, dan pada waktu itu gencatan senjata sudah diberlakukan. Akhirnya Belanda juga menandatangani Konvensi Keempat, tetapi dalam perundingan, seperti juga penguasa kolonial lainnya, sangat berhati-hati, karena sadar akan situasi di tanah jajahan mereka sendiri.

Untuk penuntutan hukum kejahatan perang, Konvensi Keempat tidak memberikan kerangka yang kuat, lebih-lebih lagi karena Belanda dan Indonesia pada bulan November 1949 telah menyepakati untuk saling memberikan amnesti untuk hampir semua kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan. Jadi, masalahnya bukan lagi soal pengadilan. Namun, untuk menilai apakah menurut pandangan kini bisa disebut ada kejahatan perang, Konvensi-konvensi tersebut memberikan kerangka analitis yang jelas.

Sampai saat ini, telah menjadi kebiasaan di Belanda untuk tidak berbicara tentang 'kejahatan perang' tapi 'kekerasan eksekutif'. Dan yang juga penting diingat adalah bahwa Belanda pada tahun 1945-1949 tidak menyebutkan adanya 'perang', tetapi yang ada adalah masalah intern. *Excessennota* (Nota Ekses) tahun 1969 lama menjadi tolok ukur untuk menghindari istilah 'kejahatan perang'. Masih pada tahun 1988 L. de Jong, penulis *Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog* (Kerajaan Belanda dalam Perang Dunia II), setelah protes keras terhadap kualifikasinya tentang kasus-kasus tertentu yang disebutkan sebagai 'kejahatan perang', memilih istilah yang lebih lemah, yaitu 'ekses-ekses' – menolak saran dari sejarawan dan ahli hukum Cees Fasseur, penulis utama *Excessennota*. Keengganan menyebut hal itu dengan istilah tersebut, sejak saat itu makin berkurang di dalam debat umum, tetapi tidak berkurang di pemerintah. Pada waktu menyatakan permintaan maaf kepada para janda Rawagede tahun

2011, ditekankan oleh dan atas nama pemerintah Belanda bahwa permintaan maaf itu hanya menyangkut kasus-kasus tertentu, yaitu kasus yang menyangkut 'ekses'. Di dalam buku ini dipilih untuk memakai istilah 'kejahatan perang' dari pada memakai istilah 'kekerasan ekksesif' yang lebih bersifat menutup-tutupi kenyataan.

Bahwa di pihak Belanda dulu ada tindakan kejahatan perang seperti yang didefinisikan oleh pelanggaran Konvensi Jenewa adalah sangat jelas. *Excessennota* memperlihatkan ada 110 kasus, seperti penyiksaan dan penembakan sewenang-wenang terhadap para pejuang yang tertawan dan penduduk sipil yang dicurigai. Dua peristiwa yang paling terkenal dan mungkin juga merupakan episode yang paling parah yang kini diakui secara umum adalah: pertama, aksi militer yang dipimpin oleh Westerling dkk. di Sulawesi Selatan dari Desember 1946 sampai Februari 1947; kedua, eksekusi sewenang-wenang kaum lelaki Rawagede di Jawa Barat pada tanggal 9 Desember 1947. Studi yang dimulai dari tahun 1969 lebih banyak lagi memperlihatkan adanya peristiwa tindakan kejahatan perang. Hal tersebut juga dibahas dalam dokumen ego pasukan Belanda kepada siapa buku ini didedikasikan. Tindakan itu terungkap sebagai fakta yang berskala luas yang mengejutkan: penyiksaan dan eksekusi sewenang-wenang terhadap para pejuang dan warga sipil, penjarahan dan intimidasi, pemerkosaan dan penghinaan, pemboman dan pembakaran desa-desa.

Tak diragukan lagi bahwa di sisi Indonesia kejahatan keji juga dilakukan – mungkin sekali pada skala yang lebih besar dan sebagian besar diarahkan terhadap orang Indonesia lainnya. Di Indonesia, penelitian terhadap hal tersebut selama beberapa dasawarsa hampir mustahil dilakukan dan kini pun masih tetap merupakan medan yang sulit disentuh. Terutama berlaku untuk debat umum terbuka mengenai periode ini, karena debat itu akan dapat menguak tirai Revolusi Indonesia yang lebih disukai tetap tertutup, yaitu mengenai: perpecahan mendalam di antara mereka sendiri, secara etnis, geografis, politik; saling melakukan tindakan kekerasan dalam skala besar dan keji terhadap sesama; ketidakmampuan, tetapi juga rasa tanggung jawab para pemimpin TNI dan pemimpin Republik.

Kini sudah mulai ada sedikit perdebatan ilmiah tentang masa Bersiap. Perdebatan itu bukan hanya menyangkut tentang ukuran besarnya, tetapi juga tentang sifat kekerasan – genosida – dan pelaku tindakan tersebut. Apakah kejadian itu merupakan kemarahan rakyat secara spontan yang diarahkan terhadap orang-orang Eropa, Indo, Cina dan tidak sedikit juga terhadap orang-

orang Indonesia yang dicap sebagai 'kolaborator', atau mungkin merupakan suatu fenomena yang disemangati dalam kalangan Republik? Yang jelas bahwa perdebatan semacam itu di Indonesia hampir tidak pernah dilakukan, dan bahwa pengetahuan dan minat tentang tindakan kekerasan yang melampaui batas yang pernah dilakukan terhadap penduduk bangsa Eropa dan Cina hampir nihil. Masa Bersiap merupakan suatu fenomena yang sama sekali tidak diketahui, dan upaya beberapa pakar sejarah Indonesia untuk menampilkan agar ada perhatian terhadap masa itu, sejauh ini hampir tidak mendapat tanggapan.

Penggambaran perang dekolonisasi seperti yang ditampilkan di sekolah, universitas, dan museum adalah jelas dan pasti. Penggambaran itu berupa cerita dari sekelompok rakyat yang bersatu dan secara heroik di bawah kepemimpinan para pemimpin Republik dan (terutama) militer bersama mengusir keluar musuh sampai akhirnya memenangkan kemerdekaan mereka. Kejahatan perang adalah hal yang hanya berkaitan dengan Belanda. Tahap refleksi belum banyak dicapai terhadap propaganda perang dari masa itu sendiri. Misal saja di Makasar ada monumen peringatan yang bernama 'Korban 40.000 jiwa' yang mengacu kepada 40.000 korban dari Westerling dan kawan-kawannya. Hal itu tidak hanya mengingatkan terhadap teror Belanda tetapi tanpa disengaja juga terhadap kaum Republik yang mencoba menarik perhatian PBB terhadap masalah kejahatan perang ini dengan nada yang kurang bernuansa.

Kekeerasan struktural?

Menetapkan, seperti yang sekarang dilakukan oleh para pakar sejarah, hakim, dan politikus bahwa para militer yang bertugas dalam dinas militer Belanda antara tahun 1945 dan 1950 di Indonesia dikatakan bersalah dalam melakukan kejahatan perang belum mengatakan apa-apa tentang pertanyaan apakah perilaku tersebut merupakan unsur dalam tindakan Belanda yang hanya bersifat perkecualian atau struktural – dalam arti unsur yang sering dilakukan. Jawaban untuk pertanyaan tersebut dapat dicapai melalui dua jalur yang berbeda. Jalur yang pertama adalah cukup sederhana dalam teori, yaitu pengumpulan lebih banyak lagi data empiris – menurut pepatah Belanda '*meten is weten*' ('mengukur adalah mengetahui': lebih baik memastikan daripada hanya menduga saja). Dalam praktiknya, hal tersebut tidak mudah dilakukan, dan pastilah upaya untuk mendapatkan gambaran yang lengkap bakal gagal. Namun, penelitian sistematis ke arsip-arsip yang tersedia, baik di Belanda maupun di tempat lain, menghasilkan banyak fakta-fakta baru.

Hal ini tercermin juga dalam buku ini. Akan tetapi, adalah ilusi untuk berpikir bahwa dengan penelitian itu realitas sejarah tersebut akhirnya akan bisa diketahui secara 'tuntas'. Pertama, ada banyak bahan arsip yang sudah hancur, hilang atau – khususnya di Indonesia – masih tidak dapat diakses untuk penelitian.

Yang lebih penting lagi adalah bahwa dalam perang ini laporan tentang kejahatan perang secara sistematis tidak lengkap, atau sangat begitu terselubung; seperti halnya dalam pengacuan kepada para tawanan yang 'tertembak ketika melarikan diri'. Meskipun tindakan itu sesudahnya mendapatkan justifikasi, pelaku yang terkait biasanya sangat sadar bahwa tindakan itu melampaui batas norma. Laporan sukarela tentang hal itu oleh pelaku tidaklah biasa. Para petinggi militer sepertinya telah bertindak berbeda untuk melaporkan kejahatan perang di mana mereka menjadi saksi atau yang mereka dengar setelahnya. Dalam beberapa kasus mereka membuat laporan dan kemudian melakukan penyelidikan dan mungkin melaksanakan hukuman. Namun, ada banyak indikasi bahwa para pemimpin itu lebih suka berdiam, apakah itu karena dalam menanggapi perilaku bawahan mereka, mereka menutup mata, menoleransi atau menyemangati, atau karena mereka ingin mencegah peristiwa ini diketahui oleh para pejabat militer yang lebih tinggi pangkatnya, oleh kalangan politik atau media. Taktik yang tepat pada waktu itu adalah memetieskan. Penuntutan pidana sangat sulit dilakukan, mengingat sarana aparat pengadilan yang terbatas dan kompleksitas situasi yang sangat rumit – tetapi ada banyak indikasi bahwa para petinggi militer dan petinggi hukum berpendapat tuntutan itu tidak pada tempatnya.

Cara lain untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan tentang kemungkinan adanya kejahatan perang struktural adalah dengan menyelidiki bagaimana perilaku seperti itu memang sesuai atau tidak dalam logika pelaksanaan perang dan organisasi militer. Sebagai tanggapan terhadap kesimpulan Perdana Menteri De Jong pada tahun 1969 bahwa dulu hanya ada kasus-kasus eksekusi, sementara sebagian besar militer Belanda berperilaku sesuai aturan, para sosiolog – yang juga veteran – J.A.A. van Doorn dan W.J. Hendrix tak lama setelah itu memberikan pendapat dengan pendekatan yang sama sekali berbeda. Dalam analisis mereka, yang ditekankan adalah karakter istimewa perang tersebut, strategi melawan gerilya dari musuh, rangkaian perintah militer yang sering kurang jelas dan instruksi kekerasan yang juga sama ambigu yang mendorong para militer tersebut masuk ke dalam sebuah '*geweldsfuik*' (jaring perangkap kekerasan) dan melakukan tindakan yang di luar jalur.

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950

Kesimpulan yang ditarik dalam buku *Serdadu Belanda di Indonesia* yang didasarkan pada kesaksian dari para veteran ini adalah bahwa ternyata begitu sering ada kasus kejahatan perang, sampai tidak dapat dianggap sebagai kejadian insidental, sebagai 'ekses-ekses'. Frekuensi kejadian itu menunjukkan pola struktural. Di lain pihak, dokumen-dokumen ego tidak menunjukkan adanya penerapan sistematis kejahatan sebagai strategi yang ditetapkan pemimpin militer. Sebaliknya, ternyata pencegahan dan penghukuman yang efektif hanya sedikit terjadi.

Perang gerilya dan Revolusi Indonesia

Sebagian besar penelitian Belanda mengenai episode ini memiliki sudut pandang terbatas. Dalam hal waktu, perhatian dibatasi sampai masa empat atau lima tahun setelah perang dan terutama tertuju pada aksi militer *Belanda*. Suatu sudut pandang yang lebih luas akan dapat memperjelas – dan dengan demikian juga membantu Belanda agar kurang menjadi fokus dalam sejarah ini. Meskipun buku ini, yang didasarkan pada dokumen ego para militer dalam dinas angkatan bersenjata Belanda, pada umumnya memiliki cakupan yang terbatas, rasanya berguna juga untuk membuat beberapa komentar tentang konteks yang lebih luas.

Pertama-tama tentang pembatasan waktu. Tidak hanya dalam debat umum, tetapi juga dalam literatur ilmiah Belanda ada kecenderungan kuat untuk memulai sejarah episode ini pada bulan Agustus 1945, dengan masa kapitulasi Jepang dan proklamasi Republik. Namun, dengan pembatasan itu jadi ada garis waktu krusial yang diabaikan. Di satu sisi ada kontinuitas dengan masa kolonial; yaitu ketika nasionalisme yang baru berkembang itu ditekan dengan segala cara oleh pihak pemerintah kolonial dan ketika tentara KNIL menimba pengalaman yang luas dalam perang gerilya dan juga dengan mengerahkan angkatan bersenjata yang berasal dari beberapa suku untuk melawan perlawanan Indonesia. Banyak dari pengalaman ini kembali dimanfaatkan pada 1945-1949. Lalu, ada pendudukan Jepang. Masa itu bagi masyarakat Eropa dan sebagian besar penduduk Indonesia merupakan masa gelap – jumlah korban sipil di kalangan penduduk Eropa yang kecil itu diperkirakan sekitar 20.000, dan di kalangan penduduk Indonesia sampai beberapa juta jiwa. Di kemudian hari ternyata periode ini dalam banyak hal juga merupakan lubang hitam bagi pemerintah Belanda dan petinggi militer, yang benar-benar meremehkan bagaimana banyaknya masyarakat Indonesia, akibat

perbuatan Jepang, pada bulan Agustus 1945 telah berubah jika dibandingkan dengan awal tahun 1942.

Peluasan kerangka penafsiran yang terutama diarahkan kepada operasi militer Belanda, dapat berguna untuk beberapa tujuan. Pada saat ini ada banyak studi tentang perang dekolonisasi dan tentang perang gerilya dan kontragerilya, studi yang seringkali menunjukkan bahwa situasi-situasi tersebut terlalu mudah menyebabkan terjadinya kejahatan perang, baik secara struktural maupun sistematis. Bagaimanapun pula studi semacam itu menawarkan banyak ruang untuk menempatkan pengalaman militer Belanda dalam perspektif internasional yang lebih luas. Tantangan ini hanya baru-baru ini dilaksanakan secara serius.

Yang lebih penting lagi adalah bahwa pemahaman yang lebih baik dari perang dekolonisasi sebagai bagian dari Revolusi Indonesia akan dapat membantu untuk menempatkan tindakan Belanda ke dalam perspektif yang lebih jelas. Bukannya tanpa alasan di dalam studi asing yang berpengaruh tentang revolusi tersebut peran tentara Belanda sering dibahas sepintas saja, dan hampir tidak diberikan perhatian untuk episode seperti masa Bersiap. Jelas memang ada yang lebih banyak terjadi dari 'hanya' perkara balas dendam dan perjuangan antikolonial saja. Sebagian penting dari kekerasan yang terjadi di kepulauan Nusantara memang bisa dikatakan disebabkan karena tidak adanya kekuasaan (kolonial) yang efektif, tetapi kekerasan itu juga mencerminkan konflik-konflik lokal di mana Belanda tidak atau hampir tidak ambil bagian – dan hanya dalam perannya sebagai penjaga ketertiban masyarakat yang benar-benar tidak dapat dipenuhinya.

Dengan begitu, perhatian untuk aksi militer Belanda pada periode 1945-1950, dan khususnya kejahatan perang Belanda, merupakan cara pandang yang terlalu terbatas untuk memahami proses sejarah yang jauh lebih besar. Mungkin hal itu memang merupakan sebagian dari penjelasan mengapa tidak banyak minat dari pihak Indonesia untuk menyelidiki tentang, atau menuntut permintaan maaf dan ganti rugi atas, kekerasan militer Belanda. Dengan semua itu bekas penjajah secara tidak sengaja memang mendapat tempat penting lagi dalam sejarah nasional yang dari perspektif Indonesia tidaklah pantas.

Perang yang ditutup-tutupi?

Ketika para militer dari pasukan Indonesia setelah berakhirnya perang dekolonisasi tersebut paling tidak mencicipi kenikmatan kemenangan perjuangan dan secara

kolektif mendapatkan status pahlawan, maka para militer Belanda pulang dengan kekalahan, frustrasi atas tahun-tahun yang hilang dalam kehidupan mereka, dan ke dalam lingkungan yang hanya sedikit memahami mereka, dan setelah bertahun-tahun berlalu malah semakin sedikit mendapatkan penghargaan untuk pekerjaan mereka di seberang lautan itu. Bagi para 'repatrian' yang pernah bertugas di KNIL dan sama sekali tidak atau hanya sedikit mengenal Belanda, masalah yang mereka hadapi ditambah lagi dengan kehilangan tanah air mereka dan tiba dari Hindia-Belanda yang sangat luas ke suatu negara Eropa yang tidak mereka kenal dan relatif kecil. Sebuah negeri induk yang sedang sibuk dengan usaha mengatasi masalah akibat pendudukan Jerman dan terutama pembangunan kembali; negeri yang ingin sesegera mungkin melupakan sejarah kolonial mereka, lagipula negeri itu tidak mengharapkan kedatangan orang-orang yang sudah 'mengakar di Hindia-Belanda', juga tidak meskipun mereka berjuang untuk KNIL dan dengan itu berarti juga untuk Ratu dan kerajaannya. Tidak heran kalau banyak imigran tersebut akhirnya memilih untuk tidak menetap di negeri Belanda yang dingin tetapi di tempat lain.

Ada beberapa cerita tentang bagaimana para veteran itu mengatasi masalah pengalaman perang mereka. Yang tak terhitung jumlahnya adalah versi di mana para veteran tersebut digambarkan sebagai orang yang pendiam, dengan perasaan sakit hati atau tidak, dirasakan menyisahkan lingkungan sekitarnya atau tidak. Tetapi meskipun demikian, berkembang suatu tradisi di mana mereka berkumpul untuk mengenang masa lalu, dalam kelompok kecil, tanpa diatur, dan jumlahnya semakin bertambah juga dalam hubungannya dengan organisasi veteran. Sebagian besar dari apa yang dibahas dalam pertemuan itu tidak dibawa keluar. Hanya sebagian kecil dari mereka yang menulis memoar tentang pengalaman mereka sendiri. Dan di sini juga berlaku: hanya sedikit dari dokumen ego tersebut diterbitkan dan didistribusikan secara luas.

Selama beberapa dasawarsa masa pascaperang para atasan tidak begitu berniat untuk mengadakan peringatan dan bahkan lebih sedikit lagi kebutuhan akan penelitian yang kritis. Para politikus terkemuka dari episode ini tetap lama menjadi tokoh yang menonjol dalam politik Den Haag, partai-partai politik utama juga tetap sama. Secara politik ada banyak pihak yang memang bertanggung jawab atas suatu kebijakan yang semakin lama semakin kurang dapat diterima sebagai wajar dan sesuai norma. Bukti bahwa dahulu ada 'kejahatan perang' – meskipun istilah itu tidak diperbolehkan untuk dipakai – diketahui secara cepat. Lagi pula, ada bukti-bukti bahwa tindakan kekejaman yang dilakukan oleh para perwira

bawahan tidak selalu dicegah atau dihukum, dan tindakan itu dalam hirarki militer yang lebih tinggi ditoleransi, malah kadang-kadang mungkin mendapat dorongan, dan kemudian ditutup-tutupi. Dan walaupun tindakan semacam itu kemudian ditoleransi atau disembunyikan oleh pertanggungjawaban politik, maka politik Den Haag juga takut kehilangan muka apabila terlalu terbuka.

Juga selama tahun-tahun perang sedang berlangsung, kadang-kadang muncul berita mengenai adanya kemungkinan tindakan kekejaman dalam pers Belanda, tetapi berita itu tidak mendapatkan banyak tanggapan, bahkan juga ketika permasalahan itu dipertanyakan di (majelis) parlemen. Di Hindia-Belanda sendiri penguasa politik dan militer melakukan kontrol ketat terhadap pemberitaan; tidak ada ruang untuk kritik atau keterbukaan tentang 'ekses-ekses'. Setelah penyerahan kedaulatan situasinya menjadi hening. Butuh waktu sekitar dua puluh tahun, sampai tahun 1969, sebelum mulainya debat umum. Veteran Joop Hueting sudah bertahun-tahun berusaha mencari publikasi dengan memberi pernyataan-pernyataan tentang kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Belanda. Pada awalnya dia tidak berhasil, sampai ketika ia diperbolehkan berbicara panjang lebar di program televisi VARA *Achter het Nieuws* (Di Balik Berita).

Tindakan Hueting tersebut mengakibatkan munculnya diskusi-diskusi sengit, perdebatan di Majelis Rendah, dan dibuatnya sebuah laporan penelitian secara terburu-buru dari komite resmi yang dalam sejarah akan dikenal sebagai *Excessennota*, yang didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan sebelumnya yang tidak disebarkan baik dalam kalangan politik maupun hukum. Jadi itu merupakan penelitian terhadap kejahatan yang secara eksplisit dilaporkan. Sementara komisi, melalui kata-kata dari Cees Fasseur, sekretaris dan peneliti utama komisi itu, menganggap laporan itu sebagai inventarisasi awal, tanggapan yang dominan dalam politik adalah untuk segera mengubur sejarah itu. Perdana Menteri Piet de Jong, seorang mantan Angkatan Laut, menulis sendiri bahwa meskipun dahulu mungkin terjadi 'ekses-ekses' yang disesalkan, tetapi para militer di pihak Belanda kala itu pada umumnya berperilaku menurut garis aturan: 'Pemerintah menyesalkan bahwa telah terjadi ekkses-ekses tetapi pemerintah mempertahankan pandangannya bahwa seluruh angkatan perang Belanda di Indonesia telah berperilaku benar. Data-data yang dikumpulkan menegaskan bahwa di masa itu tidak ada tindakan kekejaman sistematis.'⁴

⁴ Surat Perdana Menteri De Jong kepada TK (Tweede Kamer, Majelis Rendah), 29 Januari 1969 (Handelingen TK, 1968-1969, bijlage 10.008, nr 1).

Dalam debat parlemen tentang *Excessennota* ketua oposisi Joop den Uyl (Partij van de Arbeid, PvdA – Partai Buruh) bersikeras antara lain untuk dilakukan penyelidikan parlementer, tapi mayoritas di Majelis Rendah menolak hal itu. Sebelum debat itu, kabinet kanan-tengah De Jong secara intern sudah memutuskan bahwa kabinet akan memberikan tugas penelitian sejarah secara mendalam. Dari diskusi-diskusi berikutnya tentang penyelidikan luas yang akan dilakukan, ‘*verwerkingsgeschiedenis*’ (sejarah pengatasan masalah) tersebut membawa perubahan yang aneh sekali. Seorang guru besar sejarah dan seorang mantan pegawai pemerintah S.L. van der Wal dari Utrecht, yang didukung oleh Rijksc commissie voor Vaderlandse Geschiedenis (Komisi Pemerintah untuk Sejarah Nasional), menolak tugas penelitian itu karena dia pertama-pertama ingin mengungkap dahulu semua sumber. Kabinet membiarkan saja penelitian itu terhenti, oposisi politik, media, dan ilmuwan lain mungkin tidak tahu mengenai keputusan itu, atau merasa itu tidak cukup penting untuk menuntut penelitian seperti itu. Di bawah redaksi Van der Wal dan penerusnya antara tahun 1969 dan 1996, diterbitkan sebuah publikasi sumber dalam dua puluh jilid, *Nederlands-Indonesische betrekkingen* (Hubungan-hubungan Belanda-Indonesia). Dengan publikasi itu dimensi politik dan diplomatik dekolonisasi didokumentasikan secara mendalam, menjadi suatu sumber data yang sangat baik untuk penelitian ilmiah. Tetapi perang itu sendiri tetap kurang mendapat perhatian – peluang yang terlewatkan.

Keputusan akhir untuk membatalkan penelitian yang mendalam, tidaklah mengejutkan. Pemerintah De Jong sudah menduga bahwa ada lebih banyak ‘ekses’ yang terkubur dalam arsip-arsip, baik di Belanda maupun di Indonesia. Mengungkit-ungkit hal itu dianggap tidak merupakan prioritas. Sebuah kotak Pandora. Untuk politik tidak baik, untuk kepemimpinan militer juga tidak, dan juga tidak untuk para veteran, yang sebagian besar memang bereaksi sangat marah terhadap Hueting, dan media yang menulis tentang ekkses-ekkses.

Empat puluh lima tahun kemudian, hal itu juga dapat dilihat dari perspektif yang berbeda. Dengan keputusan untuk tidak melaksanakan penelitian besar-besaran, maka hilanglah peluang untuk mewawancarai para veteran, yang dahulu sebagian besar masih hidup, dengan mengajukan pertanyaan secara sistematis tentang pengalaman dan tindakan mereka di Indonesia. Peluang untuk menggali *oral history* secara mendalam mengenai pengalaman mereka, tidak pernah bisa sebesar pada waktu itu, dan kini peluang itu hampir hilang. Tentu saja ada alasan untuk percaya bahwa tidak semua veteran mau menceritakan peristiwa yang

mereka alami sebenarnya sampai mendetail. Namun demikian, studi seperti itu akan menghasilkan banyak informasi, sebagaimana tercermin dalam beberapa proyek wawancara berskala kecil antara lain dari Veteraneninstituut (Lembaga Veteran), Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (Yayasan Sejarah Lisan Indonesia), Moluks Historisch Museum (Museum Sejarah Maluku), dan Indisch Herinneringscentrum (Pusat Peringatan Hindia). Kalau melihat hal itu – dengan menyampingkan pertanggungjawaban atas kejahatan perang – maka para veteran, dan pemerintah yang berpikir melindungi mereka dengan menentang diadakannya penyelidikan yang luas pada waktu itu, malah melewatkan kesempatan besar yang sebenarnya bisa mereka dapatkan. Perdebatan sejak saat itu lebih banyak didominasi oleh emosi daripada fakta-fakta baru. Citra yang ditampilkan pemerintah De Jong tahun 1969, sejak saat itu lebih merupakan batu sandungan daripada suatu kesimpulan bersama.

Jadi seperti dalam pepatah ‘dipetieskan’? Tidak, sudah sejak lama tidak begitu lagi. Sudah ada penelitian yang dilakukan, banyak dari penelitian itu malah diarahkan kepada kejadian-kejadian yang pada tahun 1969 diklasifikasikan sebagai ‘ekses’. Berkali-kali topik perang kolonial masuk lagi dalam pemberitaan, ada wartawan-wartawan yang menuliskan tentang penemuan-penemuan baru atau mereka juga menampilkan fakta-fakta yang sudah dikenal sebagai berita. Baru-baru ini malah ada tuntutan-tuntutan hukum yang diajukan tentang kejahatan perang. Hakim memaksa negara dalam kasus-kasus spesial tersebut untuk menuntut diberikannya pengakuan, permintaan maaf dan kompensasi. Para peneliti mengaduk-aduk arsip, mewawancarai para militer dan politikus. Banyak kaum veteran yang menulis memoar mereka. Daftar publikasi ilmiah tersebut mungkin memang tidak ada artinya jika dibandingkan dengan perpustakaan yang dipenuhi dengan tulisan-tulisan mengenai pendudukan Jerman di Belanda – kesejajaran dengan sedikitnya jumlah historiografi tentang pendudukan Jepang di Hindia-Belanda adalah mencolok. Tapi penelitian apa yang diterbitkan, pasti tidak dalam sifat samar-samar. Meskipun cara masa lalu kolonial ini dikenang tidak seimbang, memetieskan hal itu menjadi alasan klise.

Penelitian ilmiah pertama yang muncul setelah *Excessennota* mempunyai nada yang berbeda. Dalam *Ontsporing van geweld* (Kekerasan di luar jalur) para sosiolog – dan veteran – Van Doorn dan Hendrix menerapkan pendekatan yang berdasarkan penjelasan. Dalam analisis mereka, yang ditekankan adalah karakter istimewa perang tersebut, strategi melawan gerilya dari musuh, rangkaian perintah militer yang sering kurang jelas dan instruksi kekerasan yang juga sama

ambigunya yang memberi pelaksana perintah tingkat rendah terlalu banyak otonomi dan mendorong para militer tersebut masuk ke dalam sebuah jaring perangkap kekerasan dan melakukan tindakan yang keluar jalur. Mereka juga meluaskan pandangan analitis dan pendefinisian kejahatan perang. Model penjelasan mereka tersebut cocok dengan literatur-literatur mengenai perang kontragerilya dan perang dekolonisasi yang belakangan banyak diterbitkan. Dari sudut pandang sejarah, pendekatan Van Doorn dan Hendrix tersebut bermasalah. Mereka menganonimkan dan mengabstrakkan semua 'insiden' yang dicatat mereka sendiri selama perang, sehingga insiden-insiden itu tidak bisa diverifikasi. Jadi, *Ontsporing van geweld* memang memberikan penjelasan yang meyakinkan tentang kejahatan perang tetapi memberikan hanya sedikit bukti-bukti konkret tentang frekuensi terjadinya tindakan tersebut. Dengan kata lain, Van Doorn dan Hendrix menjelaskan sebuah fenomena di mana mereka menyatakan jangkauannya, tetapi tidak membuktikan.

Dalam hampir semua studi yang muncul kemudian, *Excessennota* adalah titik-tolak empiris dan buku *Ontsporing van geweld* memainkan peran sebagai metode penjelasan, baik secara langsung maupun hanya sebagai latar belakang, sedangkan penelitian-penelitian yang sebenarnya lebih bersifat empiris-historis, dan dalam banyak hal mendukung analisis Van Doorn dan Hendrix. Kini jumlah daftar studi yang relevan makin bertambah saja. Di dalam studi-studi tersebut, penilaian kebijakan Belanda secara bertahap menjadi lebih kritis. Saat penulisan buku *Serdadu Belanda di Indonesia*, kami beruntung telah mendapatkan manfaat dari karya ilmiah tersebut; Di dalam panduan baca di bagian biografi, studi-studi yang paling penting disebutkan.

Literatur ilmiah kini menyajikan gambaran beraneka ragam tentang perang dekolonisasi. Setidaknya tentang peran Belanda di dalam perang tersebut. Namun, sampai sekarang belum ada jawaban yang koheren untuk pertanyaan sejauh mana kejahatan perang memang mencirikan aksi militer Belanda atau tidak. Penelitian dokumen ego yang mendasari buku ini juga belum memberikan jawaban yang memuaskan. Namun, hasil-hasil penelitian di dalam buku ini menyumbangkan pemahaman yang lebih baik tentang perang tersebut dan khususnya konteks, sifat, dan frekuensi operasi dari tindakan-tindakan yang sekarang dikualifikasikan sebagai kejahatan perang.

Korpus dokumen ego

Buku *Serdadu Belanda di Indonesia* terutama didasarkan pada pengalaman dan kenangan para militer yang bertugas di angkatan perang Belanda di Indonesia antara tahun 1945 dan 1950. Di dalam buku ini digunakan ‘dokumen-dokumen ego’ mereka: buku harian, surat, kesaksian, dan memoar. Dalam rangka penelitian ini ada banyak sekali korpus yang diteliti dari dokumen-dokumen ego yang sudah dikenal dan diterbitkan. Sebagian besar dari dokumen itu berasal dari lama setelah perang selesai. Koleksi tersebut memberikan sudut pandang yang terbatas tetapi sangat menarik. Terbatas, karena hanya melihat secara sistematis pada tentara dalam dinas militer Belanda, dan paling-paling secara tidak langsung pada lawan mereka, dan korban-korban mereka. Para politikus yang mengirim mereka, para pemimpin militer yang memberikan perintah kepada mereka untuk melaksanakan tindakan tersebut dan masyarakat Belanda tempat mereka berasal tidak menjadi bagian penting dalam sumber-sumber ini. Namun begitu, dengan memfokuskan pada dokumen ego, maka dapat diselidiki bagaimana perang tersebut dilaksanakan, dialami, dan diingat oleh sekelompok luas orang yang terkait kejadian ini – khususnya menurut perkiraan 160.000 militer yang berbahasa Belanda di antara 220.000 militer. Penyelidikan itu menghasilkan kesan dan wawasan yang sangat menarik, meskipun sering juga saling bertentangan.

Korpus yang terdiri dari 659 judul⁵ tersebut sangat luas, tetapi belum mewakili seluruh angkatan bersenjata. Ke-1.362 penulis atau pembicara – hampir semuanya laki-laki, sebagian besar lahir di Belanda – adalah sekelompok orang luar biasa. Mereka ini adalah sejumlah kecil sekali dari golongan tersebut – hanya 0,5 persen lebih dari jumlah total angkatan bersenjata, hampir 1 persen dari militer Belanda yang menentukan pilihan mereka untuk menuliskan sendiri atau dengan bantuan orang lain dan kemudian juga membagikan pengalaman dan/atau kenangan mereka, atau mereka yang tulisannya diserahkan secara anumerta. Kelompok ini tentu tidak mewakili seluruh bagian angkatan bersenjata Belanda di Indonesia. KNIL kurang terwakili dalam korpus ini.

Dalam penjelasan metodologis di bagian belakang buku ini diuraikan lebih mendalam tentang masalah keterwakilan tersebut. Pada pembicaraan masalah tersebut juga ada kriteria lain yang dibahas, yaitu: apakah ada perbedaan antara

5 Tidak termasuk dokumen ego Benno van Eijnt, *Lieve ouders* (‘Orang tua sayang’, 2013), yang meskipun digunakan dalam teks tetapi tidak ditambahkan ke pangkalan data, karena ‘buku korespondensi’ ini masih dalam embargo.

tentara profesional, sukarelawan perang, dan tentara wajib militer, dan apakah ada perbedaan latar belakang. 'Militer dalam dinas perang Belanda' tidak sama dengan 'militer Belanda'. Pasukan tentara dari KL dan KM hampir semuanya orang Belanda; sebaliknya, pasukan tentara KNIL yang bertugas bersama dan terutama di bawah orang Belanda, sebagian besar merupakan tentara yang direkrut secara lokal. Hanya sebagian kecil orang KNIL yang bisa terdaftar sebagai 'orang Eropa'. Kalau dilihat dari latar belakang daerah dan etnis mereka (warna kulit, agama, bahasa), mereka membentuk kelompok yang sangat beragam. Kelompok tersebut sangat sedikit terwakili di dalam korpus. Para militer yang direkrut di Belanda juga bisa dibedakan menurut daerah asal, latar belakang agama, tingkat pendidikan, dan mungkin juga warna pilihan politik mereka.

Dokumen-dokumen ego menjadi semakin penting dalam penelitian sejarah sosial dan budaya, juga jika fokusnya justru ada pada pengalaman dan perspektif 'orang biasa'. Istilah tersebut memang kurang enak, tetapi bisa memperlihatkan dengan baik bahwa penelitian itu terutama berkisar pada pencarian suara yang lain dari suara para elit yang kini sangat mendominasi arsip tradisional. Juga dalam penulisan sejarah militer, penggunaan dokumen-dokumen ego mengalami kemajuan pesat. Hal tersebut terutama terjadi karena perang-perang besar abad kedua puluh lebih banyak menghasilkan tulisan dari medan perang berdarah yang berasal dari para militer di mana mereka secara terbuka menulis tentang pertempuran itu sendiri, tentang hubungan-hubungan dalam tentara mereka, tentang musuh dan juga tentang emosi yang dibangkitkan oleh perang pada mereka. Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, dokumen ego tentang peperangan telah menjadi genre tersendiri, dengan konvensi-konvensinya sendiri dan bagi peneliti merupakan tantangan sendiri.

Hampir semua militer menulis surat, beberapa dari mereka – jumlahnya tidak diketahui – juga menulis buku harian. Semua itu mereka tulis, begitulah anggapan kita, untuk merekam peristiwa, kesan, dan perasaan, agar penulis mempunyai pegangan, agar bisa merefleksikan diri, dan mungkin juga untuk menghilangkan kebosanan. Jadi, bagaimanapun juga, kegiatan mereka itu adalah suatu pilihan yang disadari. Namun sayangnya, dari dokumen-dokumen ego yang diterbitkan, korespondensi dan buku harian hanya merupakan bagian yang sangat kecil. Seringkali korespondensi dan buku harian itu baru 'diserahkan' belakangan oleh keluarga mereka, dan kadang-kadang penulis-penulis itu memakai bahan itu pada saat menulis memoar mereka. Bagian terbesar dari korpus tersebut berupa literatur yang didasarkan pada ingatan-ingatan mereka. Tentu saja kami melacaki

dokumen-dokumen ego itu untuk mendapatkan fakta-fakta keras dan juga petunjuk-petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Tetapi sepertinya naif kalau mengartikan dokumen-dokumen ego tersebut sebagai kesaksian langsung perang dan akibatnya. Bahkan penulis buku harian pun mempunyai kecenderungan untuk menyaring pengamatan, pengalaman, dan perasaan mereka, mungkin untuk menyelamatkan diri atau menguatkan hati, mungkin juga untuk memberikan makna dan arah hidup mereka di angkatan bersenjata, atau mungkin diam-diam, namun sebenarnya juga mengharapkan tulisannya akan mempunyai banyak pembaca di masa depan. Penyaringan ini terutama berlaku untuk penulis surat yang langsung mengarahkan tulisannya kepada keluarga, teman atau kenalan, dan juga sengaja memilih apa yang akan atau tidak akan mereka katakan.

Dalam hal ini, sensor juga mempunyai peran: tidak semuanya boleh diberitakan, tapi sampai sejauh ini, masalah itu tidak memainkan peran besar. Yang lebih penting adalah bagaimana tentara itu mempertimbangkan perasaan mereka yang ditinggalkan di 'rumah' sana: mereka ingin membuat orang-orang di rumah tidak khawatir dengan kabar tentang bahaya-bahaya yang dihadapi, atau tentang perasaan dan perilaku mereka sendiri. Dan kemudian juga masih ada pertanyaan apakah masih ada gunanya untuk menceritakan melalui surat seluruh kebenaran yang ada: apa yang orang-orang di Belanda saat ini bisa pahami tentang situasi dunia yang jauh sekali, di Indonesia? Akan terlihat nanti bahwa tentara di surat-surat mereka ke rumah sering sengaja menahan diri dalam menggambarkan situasi-situasi yang sulit, termasuk mengenai kekerasan.

Dokumen ego yang jumlahnya tidak seberapa yang sudah diterbitkan selama konflik itu, terutama bertujuan memperkuat hubungan pihak keluarga dan handai tolan di tanah air dengan para pasukan perang. Sebagaimana kepala staf angkatan perang Belanda Jenderal Hendrik Kruls pada tahun 1947 menulis dalam bukunya *Op inspectie* (Pada pemeriksaan):

[Buku ini] hanya bertujuan sedikit memberi sumbangan untuk membangkitkan dan meningkatkan perhatian orang Belanda terhadap pasukan kami yang hebat di Hindia-Belanda dan dengan demikian lebih memungkinkan untuk mengikuti panggilan siaran radio untuk ikut berprihatin dengan anak-anak kami di seberang lautan! (Kruls 1947: 10, mem.)

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950

Sebagian terbesar dokumen ego yang diteliti, pada akhirnya ditulis, dicatat, dan diterbitkan. Ditujukan untuk publik mana? Berbeda-beda. Sebagian yang penting dari dokumen ego itu ditujukan bagi masyarakat pada umumnya. Sebuah genre tertentu, buku kenangan, terutama ditujukan pada kawan-kawan yang kini sudah tua, yang seperjuangan dan yang dari unit militer tertentu. Buku-buku itu memuat kenangan lama yang dikumpulkan untuk menyangga hubungan persahabatan. Yang ingin didirikan adalah juga semacam monumen peringatan tertulis bagi semua prajurit dan terutama bagi mereka yang gugur dalam perang itu. Sebagaimana pastor tentara Leo Goossens menulis dalam kata pengantar sebuah publikasi dari Katholieke Thuisfront:⁶

Dalam buku ini kenangan-kenangan akan militer kami di Hindia akan tetap hidup. Buku ini seperti monumen sederhana yang kecil yang memuji prestasi-prestasi mereka. [...] Biarkan buku ini memuji para pembawa Keadilan dan Kebebasan. (Goossens 1948: pengantar, art.)

Sering tertulis bahwa buku dipakai untuk menyimpan kenangan dan juga untuk orang lain yang terlibat – militer, politikus – menggambarkan ‘bagaimana keadaan yang sebenarnya’. Motif tersebut dengan berlalunya dasawarsa semakin menonjol dan publik yang dituju semakin luas saja: keluarga, teman, kenalan. Dan akhirnya, pada saat pemunculan buku memoar mencapai puncaknya, di dalam keluarga bukan hanya wanita dan anak-anak saja lagi yang terlibat dan dituju; kakek juga menceritakan permasalahannya kepada cucu-cucunya. Yang mengena adalah apa yang pada tahun 1999 ditulis Anton de Graaff – pengarang sejumlah buku dan dokumen ego tentang perang ini – dalam bukunya, *Vertel het je kinderen, veteraan!* (Ceritakan kepada anak-anakmu, veteran!):

Mantan tentara Hindia-Belanda sekarang semuanya sudah di atas 70 tahun dan mereka semakin menyadari bahwa informasi ini perlu dibuat sekarang, jika tidak maka sejarah tersebut akan terkubur bersama kami. Bahkan juga jika anak-anak kami sekarang mungkin belum tertarik akan hal ini – ketertarikan itu pasti akan datang pada mereka setelah kami tidak ada lagi, tetapi pada waktu itu mereka tidak bisa bertanya apa-apa lagi kepada kami! (De Graaff 1999: 7, mem-srt.)

⁶ Lembaga Katolik yang berkaitan dengan urusan tentara yang pergi bertugas ke medan perang dan keluarga yang ditinggalkannya.

Ini adalah motif yang berulang:

Keinginan sederhana kami adalah bahwa periode ini, yang tidak pernah bisa dan tidak pernah ingin kami lupakan, akan tetap hidup untuk generasi yang akan datang setelah kami. Kami percaya bahwa buku peringatan ini akan merupakan sumbangan untuk tujuan tersebut. (Freek de Keizer, dalam Bentschap Knook dan De Keizer 1990: 7, mem-bk.)

Meskipun demikian, saya pernah menceritakan kepada anak-anak saya tentang pengalaman saya. Mereka berulang kali meminta saya untuk menuliskan cerita ini dan akhirnya permintaan itu saya penuhi. (Ed Mahler, dalam Mahler 1992: 9, mem.)

Saya telah mencoba memberi gambaran yang jujur dan terutama akurat tentang apa yang terjadi dalam jangkauan pandangan saya, dengan harapan bahwa mereka yang usianya jauh lebih muda, akan dapat mengerti mengenai apa yang telah terjadi waktu itu. (Joop van der Meij, dalam Van der Meij 1997: 9, mem.)

Inisiatif untuk menulis buku atau menuliskan kenangan-kenangan diri dengan bantuan orang lain, tidak selalu datang dari para veteran itu sendiri. Meskipun motif penuh frustrasi seperti 'tak akan ada orang yang tertarik dengan masa hidup saya di Hindia-Belanda' berkali-kali muncul, ada juga banyak veteran yang mengakui mereka menuliskan pengalamannya atas permintaan orang-orang dari lingkungan langsung mereka.

Rencana pertama kami adalah untuk menuliskan hal ini bagi lingkungan dekat keluarga kami, tetapi ketika kami mulai mengerjakannya dan niat ini menjadi 'diketahui' orang lain, ada permintaan dari para veteran dan kenalan-kenalan lain apakah memungkinkan untuk menerbitkan kenangan tersebut dalam bentuk buku. (Jan Kot, dalam Kot dan Kot 2002: 10-11, mem-bk.)

Paling tidak pada beberapa dasawarsa terakhir juga tumbuh minat jurnalistik untuk kisah-kisah dari suatu generasi yang semakin menipis jumlahnya yang tidak mampu lagi untuk duduk di belakang komputer menuliskan kenangan-kenangan dan refleksi mereka.

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950

Penerbitan dokumen ego diperlukan untuk mengabadikan kenangan tersebut, untuk ‘menceritakan kisah yang sebenarnya’. Untuk keperluan itu kadang orang memakai catatan-catatan yang dibuat mereka semasa perang:

Apa yang dulu terjadi di Jawa Tengah harus tidak boleh saya lupakan. Pada saat itulah saya berniat untuk menuliskan semuanya, persis seperti apa yang terjadi waktu itu. (Hans Gerritsen, dalam Gerritsen 1987: 15, mem.)

Dengan tidak sepenuhnya ingin terikat dibuat pernyataan-pernyataan tentang kenyataan yang sebenarnya:

Kejadian-kejadian yang sebenarnya yang tercatat di dalam buku ini, memang benar-benar terjadi seperti itu tetapi saya menambah-nambahkan cerita sedikit dan kadang-kadang agar mudah dibaca beberapa hal ditempatkan bersama. (Ko van Rooijen, dalam Van Rooijen 1986: pengantar, bh.)

Apakah semuanya diceritakan ‘menurut yang sebenarnya’ di dalam buku kenangan ini!? Saya harap saja begitu, dan memang diusahakan setulusnya. Gunung-gunung tidak dilukiskan lebih tinggi dari kenyataan sebenarnya dan apabila Anda membaca tentang lumpur maka memang pada waktu itu betul-betul ada lumpur. Tetapi apabila saya ternyata ‘di sana-sini’ meleset, maka sebelumnya saya mohon maaf. (Toon Nieskens, dalam Nieskens 1993: 5, bh-mem.)

Buku ini menggambarkan kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi menurut pengalaman saya sebagai militer pada tahun 1945 sampai 1948 seperti catatan saya pada waktu itu yang hampir setiap hari saya buat. Saya tidak menambahkan apa-apa, kecuali, karena banyaknya bahan tulisan saya, saya harus memendekkannya. [...] Semuanya merupakan kebenaran seperti yang saya saksikan pada masa itu; jadi, itu adalah kebenaran saya. (Wim van Hamersvelt, dalam Van Hamersvelt 1995: 3, bh.)

Seringkali tulisan itu juga tentang meluruskan gambaran yang menurut mereka kurang mantap atau tidak benar.

Saya berharap moga-moga buku ini akan dapat menyumbangkan sampai [...] pada pengertian yang tepat khususnya tentang angkatan perang Belanda dan Hindia-Belanda, yang pada umumnya memperlihatkan baiknya nilai mereka selama menunaikan – sebut saja – sebuah tugas yang tidak memberikan kepuasan (G. van Heek, dalam Van Heek 1952: 9-10, mem.)

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950

Semua orang ramai membicarakan tentang pendudukan Jerman, kamar-kamar gas, kamp konsentrasi Jepang untuk perempuan, tetapi orang mendiamkan saja nasib ratusan ribu wanita dan anak Indo-Belanda, yang pertama-tama hidup dalam neraka pada pendudukan Jepang dan kemudian jatuh lagi di neraka pada masa Soekarno dan kaki tangannya. Saya mengharap moga-moga buku saya *Allen zwiigen* (Semua berdiam) bisa sedikit menguak rahasia tirai bambu. (Math Jalhay, dalam Jalhay 1983: kata pengantar, mem.)

Juga ada pengarang yang memberikan kesempatan pada orang lain untuk menyebutkan tentang motif pengakuan dan pelurusan – mungkin veteran ‘mereka’ berbicara tentang hal itu:

Bagi semuanya yang lebih beruntung dan selamat, singkatnya bagi setiap orang yang tertarik pada apa yang Bart [Korsten] pada waktu itu lakukan atas dasar idealisme, dorongan untuk merasa bebas dan usaha mencapai keadilan. (H.W. Korsten tentang kakaknya Bart Korsten yang tewas di perang, dalam Korsten 2004: 7, bio.)

Kami mengharapkan moga-moga kisah-kisah ini menjadi sumbangan terhadap penghargaan bagi ‘veteran’ pada umumnya dan ke delapan orang ini pada khususnya. (Hetebrij dan Beijer 2009: 3, bk-mem.)

Biasanya pengertian ‘meluruskan’ ditujukan untuk mengoreksi gambaran yang dianggap tidak benar. Tetapi ada pula orang yang justru butuh untuk menerangkan langkah-langkah salah yang menurut mereka kurang mendapat perhatian atau ditutup-tutupi, atau paling tidak memungkinkan adanya diskusi mengenai hal itu. Sekali lagi De Graaff, berbicara tentang masalah legitimasi perang dan ekses-ekses:

Ekses-ekses terjadi pada kedua belah pihak. Ekses-ekses yang selalu terjadi di setiap perang. Oleh sebab itu, marilah – dengan segala kejujuran dan keterbukaan – mencoba berbicara dengan anak-anak dan cucu-cucu kita. Marilah menceritakan mereka tentang semua yang dulu terjadi. Mari menceritakan mereka juga tentang apa yang dulu salah. Hanya dengan cara demikian bisa dicegah semua hal seperti itu terjadi kembali. (De Graaff 1999: 26, mem-srt.)

Dokumen-dokumen ego, baik secara sengaja atau tidak sengaja semakin banyak berfungsi sebagai medium untuk merefleksikan diri terhadap perang dan terhadap

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950

peran mereka sendiri di dalamnya. Penulisan mengenai hal itu termasuk bagian dari proses cara mengatasi masalah perasaan keterlibatan mereka. Bagi beberapa orang, seperti halnya dengan veteran Jan Dekker, mengunjungi Indonesia juga merupakan salah satu cara mengatasinya:

Keinginan untuk kembali lagi ke Indonesia, selalu saya semangati dan secara tidak sadar saya rasakan sebagai proses cara mengatasi banyaknya kenangan dan emosi-emosi yang saya alami dulu di sana. (Dekker 1999: 4, mem.)

Motif refleksi diri sering terulang-ulang:

Oleh sebab itu saya ingin menceritakan tentang seluruh periode itu dengan cara saya sendiri dan dengan bahasa yang tanpa ditutup-tutupi. Karena yang berada di Hindia-Belanda bukanlah pahlawan. Itu sudah pasti dan saya sendiri mengalaminya. [...] Itulah kami dahulu. Oleh sebab itu, jadikan cerita ini sebagai peringatan, karena saya lihat di mana-mana di sekitar saya ada tanda-tanda terjadinya perulangan. (Bertus van Gils, dalam De Hoogh dan De Hoogh-Sierat [198?]: 10-11, bio.)

Kami ingin merekonstruksi kejadian dahulu itu untuk diri kami sendiri, merenungkan kembali, mencoba mengatasi perasaan yang mengganggu itu, di kepala dan di hati dan ... ah, ... kalau kami suka menulis maka pada suatu hari muncullah cerita itu di kertas. (Bé Ronner, dalam Ronner 1993: 7, mem-bh-srt.)

Juga ada ruang untuk pertanyaan-pertanyaan yang luas, juga tentang pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa dipelajari:

Saya ingin sejujur mungkin menceritakan tentang apa yang kami kerjakan pada masa itu. Mungkin hal itu akan bisa menolong saya dan orang lain dalam pemikiran dan tindakan politik kita dan juga dapat menekan bertambahnya penggunaan kekerasan. (Jan Glissenaar, dalam Glissenaar 1992: 44, mem.)

Anda mengerti bahwa saya [...] dengan aktivitas ini saya tidak bermaksud menghilangkan pengalaman traumatis saya, atau ingin menikmati rasa egosentris saya. [...] Maksud saya adalah lebih menampilkan suatu pendapat tentang bagaimana angkatan perang seharusnya berfungsi, juga pada saat sekarang ini. (Bert Schüssler, dalam Schüssler 1998: 239, mem.)

Hanya pemuda kami dari batalyon mana saja yang dapat menceritakan bagaimana rasanya untuk berjalan berpatroli selama tiga hari berturut-turut dengan kaki yang selalu basah dan pakaian seragam yang kuyup dengan keringat.

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950

Hanya pasukan yang ikut ambil bagian dalam aksi yang disebut dengan aksi-aksi polisional, bisa menceritakan apa artinya untuk dengan perasaan sangat lelah mencari tempat berlindung dari tembakan musuh. Dan hanya tentara yang berada di sana yang dapat menceritakan tentang malam-malam ketika harus berjaga tetapi tidak dapat menduga dan melihat dan tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Pertanyaan yang timbul tentunya adalah apakah semua ini harus diceritakan dengan mendetil. [...] Pasti ada pelajaran penting dalam laporan-laporan saksi dari mereka yang melihat dengan mata sendiri serta mengalaminya pada saat itu. (Carel Tuyl, dalam Schuurmans 2012: 281, bk-kpln.)

Dengan semua tulisan di atas tentu saja bukan berarti bahwa akhirnya semua orang mau menceritakan kisahnya – jauh dari kenyataan itu. Kisah dari para veteran yang membungkam diri ada banyak sekali, dan semuanya dibuktikan dengan angka-angka yang akurat: hanya sebagian kecil dari kelompok minoritas tersebut yang menuliskan kenang-kenangan mereka. Tetap membungkam adalah yang lebih banyak terjadi. Dua orang janda tentang suami mereka:

Saya tidak bisa menceritakan apa-apa tentang masanya di Hindia-Belanda; Henny [van Benthem] tidak pernah, yang saya maksud di sini adalah betul-betul tidak pernah menceritakan tentang hal tersebut. Kadang-kadang sekali saya membuka pembicaraan tentang itu, tetapi satu-satunya yang dia katakan adalah: *'Het was ginne mooie tied'* (Bukan masa yang menyenangkan). Cuma itu saja. (Mevrouw van Benthem, dalam Morshuis dan Oude Elberink 1996: 28, bk-int-kpln.)

Saya beberapa kali mencoba agar dia [Tonnie Kamphuis] berbicara mengenai periode itu, tetapi tanpa hasil. Tonnie tidak menceritakan apa-apa, sama sekali tidak! (Mevrouw Kamphuis, dalam Morshuis dan Oude Elberink 1996: 69, bk-int-kpln.)

Kenyataan bahwa dokumen-dokumen ego ini – secara individu dan kadang juga kolektif – baru lama di belakang hari dituliskan, mengakibatkan adanya pembatasan-pembatasan. Ketika para veteran menuliskan ingatan-ingatan mereka, yang baru terjadi bertahun-tahun kemudian, seiring berjalannya waktu maka memudarlah ingatan: apa yang diingat, atau setidaknya apa yang dituliskan dari ingatan tersebut, tidak hanya terbatas karena daya ingat bisa keliru, tetapi juga diwarnai oleh kesadaran bahwa tidak semua kenangan dan pengamatan dalam konteks zaman kini yang telah berubah, bisa diterima atau relevan. Ketika orang lain di kemudian hari 'menyerahkan' tulisan dan kenangan dari seorang veteran, tidak pernah bisa dipastikan apakah mereka memilih-milih

dan menyeleksinya lebih dahulu, karena mungkin untuk menjaga reputasi dari anggota keluarga atau teman yang mereka sayangi. Dalam dokumen ego yang terbit atas dasar wawancara, faktor yang sama juga bermain peran. Tambahan pula kedinamisan antara pewawancara dan yang diwawancarai tidak netral. Pewawancara memimpin pembicaraan, sehingga dia juga yang mengarahkan ingatan-ingatan dan kisah mereka.

Pembatasan ini tidak mempengaruhi nilai unik dokumen ego sebagai sumber sejarah. Namun, harus disadari bahwa mereka kadang-kadang lebih sedikit bercerita tentang peristiwa-peristiwa itu sendiri daripada tentang penghayatan dan upaya pengatasan masalah tersebut, bahwa mereka mencerminkan berjalannya waktu, dan apa yang tidak dikatakan juga bisa punya banyak arti. Bagaimanapun juga latar belakang pribadi, motif dan juga pengalaman nyata dari orang-orang di balik dokumen ego sangat beragam. Hal ini membuat sulit untuk menemukan faktor kesamaan mereka. Hal yang justru sangat menyolok adalah keberagaman penghayatan dan ingatan.

Dokumen-dokumen ego yang diteliti dalam buku ini jelas belum memberikan gambaran lengkap yang mendasari terjawabnya pertanyaan-pertanyaan tentang kekerasan perang. Tidak semuanya diungkapkan. Kadang-kadang ada yang agak diputar-putar, dan kadang juga ada yang diutarakan dengan tanpa tedeng aling-aling:

Sepertinya digambarkan seolah-olah kami semua di sana bertindak seperti binatang dan penjahat dari jenis yang paling kejam. [...] Nah, semua ingatan jadi datang lagi dan kami harus memprotes. [...] Kini, oleh karena itu saya menulis buku harian ini, tanpa dibumbui, tetapi seperti yang terjadi dahulu. Tidak ada yang bohong dan tidak ada yang dilebih-lebihkan. Tidak semuanya dituliskan, karena memang tidak mungkin untuk menuliskan semuanya. Mungkin saya akan menyakiti perasaan yang saya tinggalkan kelak dan saya tidak mau melakukan itu. Tapi bukan berarti saya menutup-nutupi 'hal-hal yang kotor', tetapi orang tidak mungkin bisa menceritakan semuanya. (Gerben Deters, dalam Deters 1994: 8, bh-mem.)

Cerita-cerita tentang 'api dan darah' sudah banyak dituliskan dan meskipun betapa menariknya cerita-cerita itu, saya tidak mau ikut terkait. Juga ada cerita-cerita yang tidak diceritakan. Kalau diceritakan bisa menyobek kembali luka lama. Cerita-cerita seperti itu juga tidak akan ditemukan di buku ini. (Jan Maas, dalam Maas 1999: 5, mem.)

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950

Yang memang dibicarakan dalam dokumen ego tentang kejahatan perang yang mungkin terjadi adalah, bahwa hal itu – ini harus dikatakan – seringkali ada dalam konteks yang tidak memberikan gambaran peristiwa-peristiwa khusus. Sumber-sumber tersebut menjelaskan adanya kenyataan yang kompleks di mana gambaran-gambaran klise tentang pahlawan dan bajingan kurang tepat, tentang budaya militer yang dalam konteks kontragerilya Belanda mewujudkan praktik-praktik dan norma-norma sendiri. Kami melihat pengarah dan pengontrolan terbatas dari atas, adanya pergeseran pandangan tentang apa yang bisa dan yang tidak diperbolehkan, dan biasanya sebagian merupakan improvisasi, tetapi kadang-kadang merupakan penggunaan struktural kekerasan di luar batas tindakan perang yang biasa. Renungan Ben Loohuis, beberapa puluh tahun kemudian, Mencirikan upaya agar orang luar bisa memahami bahwa kini berlaku norma yang berbeda daripada dahulu:

Sekarang, 50 tahun kemudian, tindakan-tindakan tersebut [mengeksekusi tawanan] memberikan kesan yang tidak baik. Tetapi, pada masa itu orang tidak berpikir begitu. Perang gerilya adalah kotor dan jahat bagi kedua belah pihak. Yang terpikirkan adalah masalah menyelamatkan diri. Lagi pula aksi-aksi para pelopor tak berperikemanusiaan dan mengerikan. Tidak ada banyak belas kasihan, justru yang ada adalah sebaliknya, bagi kedua belah pihak. (Loohuis 1999: 71, bk-mem.)

Hal tersebut berlawanan dengan apa yang pada tanggal 10 Agustus 1949 ditulis Benno van Eijnt, tentara wajib militer dan calon ekonom, kepada orang tuanya tanpa dimanis-maniskan:

Setiap bom dan setiap peluru terasa menembus jantung saya apabila saya memikirkan korban yang mungkin kena serangan itu. Di tempat-tempat manapun yang saya singgahi, selalu ada mata-mata tak mengerti, yang memandangi saya dengan putus asa, yang memohon untuk tidak ditembak oleh manusia-manusia yang buas seperti binatang dan yang mengambil alih tangan Tuhan untuk menghabisi nyawa orang-orang naif tersebut. (Van Eijnt 2013: 123, srt.)

Berkaitan dengan hal itu adalah refleksi tentang apa gunanya perang, kepercayaan dalam misi untuk memulihkan kekuasaan dan ketertiban demi kebaikan penduduk. Mungkin banyak orang pada awalnya mendukung kata-kata Willem Brandt:

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950

Politik kalangan atas, jauh dari kami. Kami hanya prajurit dan kami hanya disuruh memperbaiki persoalan-persoalan yang sederhana saja: kami harus menyelamatkan rakyat dari keruntuhan mereka. (Brandt 1947: 124, art.)

Namun, berangsur-angsur banyak orang yang semakin meragukan pernyataan itu. Dan dalam kasus Willem Brandt – nama samaran Willem Klooster – adalah mengenai seorang *embedded journalist* (wartawan yang diikutsertakan dalam pasukan), yang dibebani tugas oleh pimpinan tentara untuk menuliskan kisah-kisah di tempat guna mendukung misi tersebut. Jadi, bukan sumber-sumber yang dapat dipercaya begitu saja. Sudah pasti tidak semua prajurit melihat misi tersebut sebagai yang diperlihatkan oleh Brandt pada tahun 1947. Dokumentasi ego penuh dengan kemarahan tentang kurangnya peralatan dan pelatihan, tujuan yang tak terjangkau, keraguan dan sinisme tentang misi tersebut, yang di tahun-tahun kemudian semakin menjadi lebih kuat saja. Sejalan dengan hal itu timbul pengamatan tentang penduduk lokal dan tentang ruang lingkup nasionalisme. Rasa tidak mengerti, simpati, paternalisme, dan juga rasisme. Secara bersamaan, sinisme tentang kepemimpinan politik dan politik internasional yang melemahkan perjuangan militer semakin lebih jelas dan justru menjadi argumen untuk mendukung perang.

Keterasingan juga, yang bagi beberapa orang tampaknya seperti derita tidak ada habisnya. Pertama, rasa tidak mengakar di daerah tropis, kemudian timbul perasaan yang merayapi yang memberikan pemikiran bahwa mungkin orang-orang di rumah sana, di Belanda, tidak punya gambaran mengenai apa yang terjadi di tempat yang jauh ini dan juga tidak berusaha untuk mengerti hal itu. Dan akhirnya, perasaan terasing pada waktu kembali ke Belanda, perasaan adanya jarak yang tumbuh, kesadaran bahwa banyak pengalaman di Hindia-Belanda yang tidak memungkinkan untuk berbagi, keputusan atas dasar kesadaran, atau mungkin kebiasaan yang secara tidak sadar tumbuh sendiri untuk toh lebih baik tutup mulut. Gambaran yang muncul dari buku ini adalah tidaklah seragam. Bagaimana bisa seragam kalau jumlahnya berkenaan dengan 1.362 individu. Tentu saja pasti ada cukup banyak orang yang bisa meneruskan dan menikmati kehidupan mereka lagi dan menganggap selingan hidup di Indonesia adalah masa lalu yang sudah berada di belakang mereka. Kelompok itu, mungkin malah merupakan kelompok mayoritas, bisa jadi tidak banyak terwakili di antara para penulis memoar tersebut. Jan de Golde mengacu pada perasaan campur-aduk tersebut:

Serdadu Belanda di Indonesia 1945-1950

Masih ada sangat banyak orang yang serasa hidup di neraka, yaitu seperti Hindia-Belanda bagi kami dulu. Tapi meskipun begitu, kami mencintai negara dan rakyat itu. Tidak ada barang berharga apapun yang bisa mengganti perasaan kami terhadap negara itu. (De Golde 2001: kata pengantar, mem.)

Pernyataan yang terakhir itu merupakan suatu pengamatan, akan terbukti nantinya, yang tidak semua orang dalam korpus dokumen ego ini akan setuju.